



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KOMISI IX DPR RI**

Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	III (Tiga)
Rapat ke	:	7
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Hari, Tanggal	:	Senin, 14 Januari 2019
Waktu	:	13.00 s.d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I
Ketua Rapat	:	DR. H. Saleh Partaonon Daulay, M.Ag, M.Hum, MA/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Yanto Supriyanto/Kabag.Set Komisi IX DPR RI
Acara	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membahas hasil pertemuan Menteri Ketenagakerjaan RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Taiwan terkait perlindungan PMI di Taiwan;</li><li>2. Membahas progress kebijakan perlindungan pekerja seni dan film yang masuk ke Indonesia (sesuai Kesimpulan Rapat Kerja Tanggal 7 Februari 2018);</li><li>3. Dampak program <i>Pilot Project</i> Penempatan PMI ke Saudi Arabia melalui <i>one channel model</i> terhadap Perlindungan PMI di masa yang akan datang;</li><li>4. Peran dan tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan dalam perluasan kerja dan mengantisipasi dampak PHK besar-besaran pada perusahaan akibat digitalisasi industri 4.0 pada jalan tol, industri makanan dan pertanian;</li><li>5. Dampak divestasi saham PT Freeport Indonesia ke Pemerintah Indonesia melalui PT. Inalum terhadap kebijakan ketenagakerjaan;</li><li>6. Progres pembentukan aturan turunan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU K3, UU BPJS dan UU Ketenagakerjaan lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.</li></ol>

Hadir	:	<p><b>A. ANGGOTA KOMISI IX DPR RI:</b> 25 orang Anggota dari 51 Anggota Komisi IX DPR RI</p> <p><b>B. PEMERINTAH :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Khairul Anwar beserta jajaran;</li> <li>2. Dirjen Binalattas Kemenaker RI, Bambang Satrio Lelon beserta jajaran;</li> <li>3. Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker RI, Maruli Apul Hasoloan beserta jajaran;</li> <li>4. Dirjen PHI dan JKS Kemenaker RI, Haiyani Rumondang beserta jajaran;</li> <li>5. Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker RI, Sugeng Priyanto beserta jajaran.</li> </ol>
-------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**JALANNYA RAPAT:**

**PIMPINAN RAPAT (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG, M.HUM, MA/ F-PAN):**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang terhormat saudara Sekretaris Jendral Kementerian Tenaga Kerja beserta seluruh jajaran.**

**Yang terhormat saudara-saudara Anggota Komisi IX DPR RI.**

Pertama sekali tentu kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada siang menjelang sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikan waktu untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat terkait dengan beberapa kerja pekerjaan yang dikerjakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sebelum saya melanjutkan rapat ini, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Sekretariat Komisi IX bahwa yang hadir, yang sudah menandatangani absen pada saat ini sudah sampai 10 orang anggota dari 8 Fraksi yang ada. Saya mau menawarkan ini sebetulnya dari sisi kuorum Fraksi sudah lewat ini, karena sudah lebih dari 50%. Saya tawarkan apakah ini bisa dilanjutkan atau kita skors 5 menit lalu buka lagi? Lanjut ya? Baik.

**(RAPAT : SETUJU)**

**RAPAT DIMULAI 13.42 WIB**

Karena itu dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* rapat ini saya nyatakan dibuka, dan terbuka untuk umum. Sekarang pukul 13.42 menit nah saya tawarkan ini rapat paling kita coba dulu paling lama pukul 15. Setuju? 15 ya? Baik.

### **(RAPAT : SETUJU)**

Selanjutnya saya ingin menjelaskan kepada kita semua ada beberapa agenda rapat yang akan kita lalui hari ini, dan mungkin kita akan mendengarkan penjelasan dari pemerintah. Yang pertama tentang membahas hasil pertemuan Menteri Tenaga kerja Republik Indonesia dengan Menteri Ketenagakerjaan Taiwan, terkait dengan perlindungan PMI di Taiwan. Nanti mohon dijelaskan sepiantas juga soal mahasiswa yang katanya dikerja paksa di Taiwan kan itu sangat apa namanya, membuat hati kita miris dan tentu saja membuat anggota DPR juga menjadi pusing karena ditanya oleh masyarakat.

Yang kedua yaitu membahas tentang progres kebijakan perlindungan pekerja seni dan film, yang akan bekerja ke luar negeri maupun pengaturan pekerja seni dan film asing yang masuk di Indonesia. Ini sesuai dengan kesimpulan rapat kerja tanggal 7 Februari 2018.

Yang ketiga dampak program *failed project* penempatan PMI ke Saudi Arabia melalui *one channel, one channel model* terhadap perlindungan PMI di masa yang akan datang. Ini nanti mungkin kita mau dengan dulu nih progresnya seperti apa. Kemudian dampaknya nanti seperti apa, dan hal-hal baru yang membedakan dia dengan penempatan yang sebelumnya seperti apa. Ini penting supaya nanti kita juga bisa mempertanggung jawabkan kira-kira kalo ditanya masyarakat bisa mempertanggung jawabkan dan menjawab secara benar apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terhadap PMI kita yang akan bekerja di Saudi.

Keempat, peran dan tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan dalam perluasan kerja dan mengantisipasi dampak PHK besar-besaran pada perusahaan akibat digitalisasi industri, atau revolusi 4.0 pada jalan tol, industri makanan dan pertanian. Ini khusus jalan tol, industri makanan dan pertanian. Mungkin nanti bisa juga kita cerita yang lain tapi ini di dalam undangan yang kita sampaikan itu khususnya tentang jalan tol yang sudah pakai sistem *id card* itu yang memudahkan orang masuk dan keluar dari jalan tol.

Kemudian dampak divestasi saham PT. Freeport Indonesia ke pemerintah Indonesia melalui PT. Inalum terhadap kebijakan ketenagakerjaan. 6 progres pembentukan aturan turunan dan undang-undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, undang-undang K3, undang-undang BPJS, dan undang-undang Ketenagakerjaan lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jadi dari semua agenda rapat yang kami sampaikan tadi ada beberapa hal. Ini kan ada 6 pak, tapi setidaknya yang menjadi poin utama yang pertama tadi yaitu nomor urut 1 yaitu soal pertemuan Menteri Ketenagakerjaan kita dengan Menteri Ketenagakerjaan Taiwan itu. Kemudian yang kedua ya soal penempatan pekerja migran Indonesia ke Saudi, yang sekarang moratoriumnya sudah dicabut dan saya kira dua hal tersebut proporsinya di tambahkan dari penjelasan proporsi poin-poin yang lain. Demikian bapak ibu saudara agenda yang akan kita lalui yang kita diskusikan pada rapat ini, selanjutnya saya minta kepada saudara Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyampaikan paparan dan kalau memang pak Sekjen merasa ada Dirjen yang lebih tepat untuk menjawabnya atau memaparkannya saya kira ndapapa langsung pada Dirjen yang bersangkutan. Demikian kita persilahkan.

#### **SEKJEN KEMNAKER RI :**

**Baik terimakasih bapak pimpinan.**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang kami hormati bapak ibu ketua Komisi IX DPR RI, bapak ibu Anggota Komisi IX DPR RI, bapak-bapak dan ibu rekan-rekan kami dan Dirjen, para direktur yang hadir pada kesempatan disini.**

**Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena siang ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka RDP kita.**

Seperti yang sudah bapak pimpinan sampaikan ada beberapa pokok bahasan yang akan kami sampaikan di dalam kesempatan rapat yang berbahagia ini. Yang pertama pokok pembahasan pertama adalah hasil pertemuan Menaker RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Taiwan terkait perlindungan pekerja imigran Indonesia di Taiwan. Sebelumnya kami mohon izin bapak pimpinan, kami hanya sekilas saja menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan penjelasan pokok bahasan yang

dimintakan kepada Kemenaker, nanti mungkin lebih detailnya bapak dan ibu Dirjen yang terkait yang akan lebih bisa menjelaskan secara detail apa yang sudah dilakukan terkait dengan pertanyaan yang bapak dan ibu sampaikan kepada kami. Yang pertama terkait dengan hasil pertemuan bapak Menteri tenagakerja RI dengan Menteri tenagakerja Taiwan dibahas beberapa hal yang terkait bagaimana perlindungan PMI kita di Taiwan. Ada kesepakatan yang telah di hasilkan, ada beberapa kesepakatan yaitu sebanyak 16 kesepakatan yang intinya adalah adanya keinginan perlindungan PMI kita di Taiwan. Yang kedua adalah bagaimana cara meningkatkan perlindungan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bapak Menteri Ketenagakerjaan dengan Menteri tenagakerja di Taiwan, yaitu yang pertama bagaimana mempersiapkan PMI kita yang akan berangkat ke Taiwan. Yang kedua adalah bagaimana melakukan sosialisasi aturan-aturan sehingga akan meminimalisir permasalahan yang timbul ketika sudah di tempatkan di negara penempatan khususnya di Taiwan. Yang ketiga adalah melakukan upaya pembicaraan melalui hal-hal yang sifatnya insidental sebagai misal bila PMI kita ada kecelakaan atau PMI kita mengalami musibah yaitu meninggal di Taiwan, bagaimana pembiayaan pemulangan jenazah PMI nya. Yang berikutnya adalah koordinasi terkait dengan substansi pernyataan pembiayaan gaji, pernyataan biaya dan gaji, hal-hal tersebut telah dibicarakan oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia dengan Menteri tenagakerjaan Taiwan. Yang berikutnya adalah terkait dengan progres kebijakan perlindungan pekerja seni dan film yang akan bekerja ke luar negeri maupun pengaturan pekerja seni dan film asing yang akan masuk ke Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan hubungan kerja dalam bidang seni dengan kesimpulan sebagai berikut. Pertama perlu dilakukan sinergitas dan kerja sama di antara pihak terkait guna mendorong kerjasama yang berkelanjutan. Yang kedua adalah perlindungan terhadap pekerja seni berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman, ini sebagian sudah dilaksanakan oleh *production house*. Yang berikutnya adalah perlunya pengaturan waktu kerja atau waktu istirahat. Yang terakhir adalah perlunya pembenahan upah bagi insan seni untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi pekerja yang berada pada level paling bawah.

Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang pertama adalah mempelajari irisan antara undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melihat bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada artis maupun *crew* film. Yang berikutnya adalah perlunya ada standarisasi kontrak kerja yang baku bagi artis yang mengatur hak dan kewajiban waktu kerja, upah, jaminan sosial dan hak-hak lainnya. Yang berikutnya adalah perlu diatur waktu kerja, waktu istirahat secara khusus bagaimana amanat pasal 77 ayat 4 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan bagi pekerja seni yang akan bekerja di luar negeri dan pekerja seni dan film asing yang masuk ke Indonesia, poin pertama adalah pekerja seni dan film yang akan bekerja ke luar negeri merupakan pekerja migran perorangan, yang perlingungannya mengacu pada Permenaker nomor 18 tahun 2018 tentang program jaminan sosial tenaga kerja Indonesia. Yang kedua adalah permenaker nomor 18 tahun 2018 CPMI atau PMI yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam program JKK dan JKN serta dapat mengikuti JHT. Yang berikutnya adalah pekerja seni dan film asing yang masuk ke Indonesia merupakan pekerja bukan penerima upah, sehingga perlingungannya mengacu pada undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, dimana orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program Jamsos.

Pokok bahasan yang ketiga adalah dampak *program pilot project* penempatan pekerja imigran Indonesia ke Saudi Arabia melalui *one channel model* terhadap perlindungan pekerja imigran Indonesia dimasa yang akan datang. Sistem penempatan satu kanal yaitu sistem penempatan dan perlindungan pekerja Imigran Indonesia yang terintegrasi secara *online* antara pemerintah Republik Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi dimulai dari informasi, pendaftaran, seleksi, penempatan dan pemulangan yang berada dibawah kendali pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua adalah pelaksanaan sistem penempatan satu kanal. Yang pertama melalui hubungan kerja antara pekerja imigran Indonesia dengan agency penempatan di kerajaan Arab Saudi atau syarikah. Penempatan pekerja migran Indonesia untuk jabatan *housekeeper, babysitter, family cook, elderly caretaker, family driver* dan *child care worker* dilakukan secara bertahap sejak diluncurkannya sistem penempatan satu kanal dan disesuaikan dengan ketersediaan dan permintaan pekerja imigran

Indonesia. Untuk penem SPSK ini dilakukan di Riyadh, Jeddah, Madinah dan wilayah Timur seperti Damam, Dahrhan dan Kobar.

Poin berikutnya tidak membebankan biaya dalam bentuk apapun kepada pekerja imigran Indonesia. Kelebihan sistem satu kanal yang pertama adalah verifikasi GO dan mitra agency oleh atasan tenaga kerja, yang kedua proses penyiapan CPMI yang kompeten, yang ketiga proses *matching* antara *demand* dan *supply* tenaga kerja, yang keempat adalah pengaturan penerbitan visa atau *enjust* P3MI melalui pemerintah Indonesia, pengeluaran visa kerja dilakukan setelah kontrak kerja divalidasi oleh pemerintah Indonesia. Yang keenam adalah *call center* 24 jam dalam 9 bahasa termasuk bahasa Indonesia, yang ketujuh kafalah tidak lagi berada di pengguna perseorangan tetapi syarikah, yang kedelapan *shelter* disediakan oleh Arab Saudi, sembilan dikontrol melalui *online* sistem.

Perbedaan sistem lama dan sistem baru kalo kita lihat dari dampak positifnya yang pertama adalah proses rekrutmen dan penempatan dapat dimonitor atau diawasi pemerintah masing-masing negara. Baik negara asal maupun negara tujuan. Yang kedua pengguna perseorangan atau majikan tidak lagi bertindak sebagai sponsor melainkan perusahaan berbadan hukum atau yang kita sebut syarikah yang terdaftar pada MLSD. Yang berikutnya pemerintah kerajaan Arab Saudi menetapkan secara khusus dan menjamin syarikah tertentu yang boleh melakukan penempatan. Yang keempat syarikah bertanggung jawab langsung terhadap perlindungan PMI dalam bentuk, yang pertama memiliki *shelter*, kedua melaksanakan orientasi program bagi PMI, yang ketiga melakukan *assessment* terlebih dahulu guna memastikan perlindungan dan kelayakan pekerja PMI, *assessment* terhadap *user* dilakukan antara lain terhadap kondisi tempat tinggal atau tempat kerja PMI, kondisi ekonomi atau pendapatan pengguna dan jumlah keluarga serta yang lain-lainnya. Yang kelima adalah gaji paling lambat dibayarkan 2 minggu setelah tanggal pembayaran dan dimonitor dalam sistem musanet. Dampak positif yang keenam adalah pembayaran gaji dapat di awasi atau dimonitor karena dibayarkan melalui perbankan dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran gaji dapat segera terdeteksi. Yang ketujuh pemerintah kedua negara menjamin *job order* karena telah diverifikasi oleh kedua belah pihak. Kedelapan verifikasi implementasi prosedur rekrutmen dan penempatan di lapangan oleh *joint committe*. Yang kesembilan, penyelesaian masalah cepat ditangani karena sudah ada mekanisme yang jelas. Sepuluh, permasalahan cepat

terdeteksi karena adanya *call center* khusus dengan 9 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Sebelas, *unjust* lebih ketat dan terkontrol karena dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari pihak pemerintah Republik Indonesia. Dua belas, penerbitan visa kerja lebih terkontrol dengan keterlibatan pemerintah Indonesia atau Atnaker. Yang ketiga belas, PMI dapat lebih mudah berkomunikasi dengan keluarga dan saudaranya karena *user* wajib memberikan akses untuk berkomunikasi serta akses memiliki alat komunikasi atau *handphone*. Yang keempat belas, pekerja migran memiliki minimum 9 jam istirahat secara terus menerus dalam sehari, yang ke 15 pekerja migran harus mendapatkan waktu istirahat setidaknya 1 hari dalam seminggu, ketika pekerja domestik sakit wajib diberikan izin untuk istirahat dan tetap mendapatkan gajinya secara reguler, syarikah wajib membayar biaya yang timbul selama perawatan medis. Yang ke 16 jam kerja tertera dengan jelas dalam kontrak dan syarikah wajib membayar upah untuk setiap jam lembur. Yang ke 17 syarikah berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap biaya transportasi atau memberikan biaya transportasi. 18 ketika kontrak antara pekerja migran dengan syarikah berakhir maka syarikah wajib membayar satu bulan gaji dan biaya pemulangan ke Indonesia. 19, pekerja imigran wajib memiliki asuransi kesehatan. 20, pekerja migran dapat berganti user melalui syarikah jika di inginkan. 21, hanya agency penempatan dari kedua negara yang memiliki lisensi yang boleh merekrut dan menempatkan. Kondisi pengaduan saat ini dari bulan, dari tahun 2016 sampai 2018 terlihat adanya penurunan seperti apa yang tergambar dalam grafik dibawah tersebut. Dari tahun 2016, 1.084 pengaduan, tahun 2017 menurun 859, dan tahun 2018 *Alhamdulillah* menurun secara signifikan sebesar 385.

Pokok bahasan yang keempat adalah peran dan tanggung jawab Kemenaker RI dalam perluasan kerja dan mengantisipasi dampak PHK besar-besaran akibat digitalisasi industri 4.0 pada jalan tol, industri makanan dan pertanian. Seperti kita sudah ketahui bersama bahwa adanya transformasi digital tidak bisa tidak kita, tidak bisa terhindar maksud kami, tidak bisa terhindar adanya perubahan dunia kerja khususnya pekerjaan yang tumbuh dan pekerjaan yang hilang. Oleh karena itu hal-hal yang telah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan adanya industri revolusi industri 4.0 ini, yang pertama adalah adanya kebijakan dari bapak Menteri kami, yang pertama adanya upaya program *skilling* atau memberikan pelatihan kepada para pencari kerja, terus yang kedua adalah *up skilling* kepada para



pekerja, dan yang ketiga adalah *reskilling* kepada para pekerja yang terkena dampak PHK. Problem-problem tersebut diatas saat ini sudah beberapa satu tahun terakhir ini sudah gencar di laksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui lembaga-lembaga pelatihan baik lembaga pelatihan pemerintah atau BLK, lembaga pelatihan kerja swasta, dan termasuk juga lembaga pelatihan yang ada di Industri atau BLK-BLK komunitas yang saat ini juga sudah gencar untuk di bangun. Target pelatihan untuk tahun 2019 seperti yang tertuang didalam rencana kerja pemerintah ada sebanyak 1,4 juta orang yang dilakukan tidak hanya oleh Kementerian Ketenagakerjaan tapi oleh Kementerian lembaga terkait. Untuk monitor dan data-data progresnya saat ini dikoordinir oleh Bappenas adapun konsep pelatihan vokasi sebagai langkah strategis pembangunan SDM Indonesia seperti sudah sering bapak Menteri kami sampaikan kepada forum yang berbahagia ini bahwa bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan fokus kepada memberikan akses dan mutu terhadap pelatihan vokasi. Yang berikutnya adalah Kementerian Ketenagakerjaan juga terus mendorong adanya satu kebijakan sosial didalam memberikan perhatian yang cukup terhadap pekerja kita khususnya yang terkena dampak PHK yaitu dengan memberikan satu skema *skill development fund* dan *an employment benefit* yang saat ini terus dibahas dan sudah ada kemajuan yang signifikan antara lain adalah sudah di bicarakan di tingkat Kementerian Keuangan dan BPJS untuk tahun 2019 ini mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan program seperti ini.

#### **SEKJEN KEMNAKER RI :**

Untuk pokok bahasan kelima yaitu dampak divestasi saham PT. Freeport Indonesia ke pemerintahan Indonesia melalui PT. Inalum terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Status ketenagakerjaan terkait transisi kepemilikan saham Freeport yang pertama adalah, kondisinya kementerian BUMN telah menyatakan bahwa pengalihan kepemilikan mayoritas saham PT. Freeport Indonesia tidak akan berdampak pada nasib karyawan Freeport. Yang kedua adalah, kementerian BUMN akan mengawasi secara ketat agar tidak terjadi PHK dan kesejahteraan tidak berubah bahkan lebih baik lagi.

Pokok bahasan yang ke 6 adalah, progres pembentukan aturan turunan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, undang-undang

tentang keselamatan dan kesehatan kerja, Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan undang-undang tenaga kerja lainnya dalam peningkatan kesejahteraan pekerja. Progres yang telah dilakukan oleh Kementerian tenaga kerja adalah, antara lain adalah didalam menindak lanjuti Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah ditetapkan 8 peraturan pemerintah, 3 peraturan presiden, dan 1 keputusan presiden. Yang belum kita siapkan adalah adanya 3 PP yang terkait dengan pesangon, koperasi pekerja atau buruh dan fasilitas kecelakaan pekerja atau buruh. Dan juga yang belum kita inikan adalah 1 Perpres terkait dengan lembaga koordinasi pelatihan kerja nasional.

Sedangkan untuk Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sudah kami selesaikan adalah aturan-aturan banyak 10 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden. Untuk Undang-Undang 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang sudah kami selesaikan yaitu 3 peraturan pemerintah dan 1 peraturan presiden. Sedangkan untuk Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang sudah kami selesaikan yakni 1 peraturan pemerintah dan 13 peraturan menteri. Sedangkan untuk Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang sudah kami proses adalah 3 peraturan presiden, maaf 3 peraturan pemerintah dan 2 rencana peraturan presiden masuk dalam program penyusunan tahun 2019, terus rancangan peraturan presiden badan masih dalam pembahasan antar Kementerian salam Kementerian PAN dan RB. Sedangkan 1 permen sudah di undangkan yaitu terkait dengan permen tentang BPJS, jaminan sosial.

Bapak ibu sekalian yang kami hormati, bapak pimpinan serta bapak ibu Anggota Komisi IX yang saya hormati demikian penjelasan dari kami, untuk selanjutnya mohon kalo memang ada pendalaman kami mohon bapak dan ibu Dirjen yang bisa memberikan lebih jelasnya lagi. Lebih kurang kami mohon maaf.

***Assalamualaikum Warabmatullahi Wabarakatuh***

**PIMPINAN :**

Baik ini sudah kita dengarkan penjelasan dari pak Sekjen. Ada pejabat yang lain yang ingin menyampaikan atau memberikan tambahan penjelasan nggak kira-kira? Sebelum saya lanjutkan nih saya perkenalkan dulu ada anggota baru kami pak, namanya pak Jalaluddin Akbar dari Sulawesi Selatan 1. Silakan pak, nanti kalo

ketemu di jalan jangan salah-salah pak anggota Komisi IX. Dari fraksi Hanura ya. Baik saya kemudian di pemerintah ini kan banyak yang berubah nih, ada pak Ir. Khairul Anwar sekarang sebagai sekretaris jendral, kemarin kalo nggak salah saya ini ya pak ya apa Irjen ya? Oh staf ahli ya sekarang jadi sekjen. Ada pak Bambang ini masih lama orang lama Bambang Satrio, ada pak Maruli juga masih orang lama, ibu Hayani Rumondang dan pak Sugeng sama-sama masih yang lama.

Baik ada yang mau ditambahkan pak Maruli? Terkait dengan penempatan itu sudah sejauh mana itu barangnya? Karena saya dengar ada juga saya mendapat apa wa wa yang menurut saya mengkritisi Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan itu. Silakan pak.

#### **DIRJEN BINAPENTA DAN PKK KEMNAKER RI:**

Baik pak, terima kasih. Ijin pak Sekjen.

Yang saya hormati bapak ibu pimpinan Komisi IX, para anggota. Izinkan kami menambahkan pak.

Yang pertama mengenai Taiwan dulu pak mungkin. Kami didalam pertemuan dengan bapak Menteri dengan Menteri Ketenagakerjaan Taiwan waktu itu memang sudah membahas sudah menandatangani MoU, memang itu ada beberapa perubahan dan memang pada intinya seperti yang dikatakan tadi kesepakatannya ada 15. Walaupun nanti kita akan mengadakan pertemuan lebih lanjut, jadi bukan hanya MoU pak nanti kita bikin pertemuan lebih lanjut melalui *joint working group* untuk menindak lanjuti apa yang sudah tertuang 15, minimum 15 *item* itu untuk dijabarkan lebih lanjut. Seperti misalnya, usulan kami Kementerian waktu itu menaikkan gaji ternyata memang mungkin diterima tetapi mereka akan membahas karena menetapkan gaji TKI, PMI kita itu juga tersangkut dengan gaji pekerja migran dari negara lain. Jadi memang itu memang kita tindak lanjuti dari ke 16 ini.

Lalu yang kedua pak yang terkait dengan apa yang dinamakan isu-isu yang sekarang ini memang ada beberapa hal yang mungkin kita sikapi, jadi ada sebenarnya yang ada sekarang ini bapak pimpinan itu adalah sebenarnya terkait dengan industri-industri *internship* program tidak terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi kalo kita MoU mengenai ketenagakerjaan, Dikti juga punya MoU nah ini yang memang yang terkait

dengan kebetulan kalo kita terkait dengan upahnya mungkin didalam magang. Tetapi didalam MoU nya ini terkait dengan Dikti dan juga melalui Kementerian perdagangan yaitu KDII nya. Kalo kita lihat bapak ibu sekalian memang ada beberapa hal tetapi kami sudah tindak lanjuti, yang pertama mungkin yang hari ini kita juga sudah tindak lanjuti yang paling utama adalah kita sudah mem *freeze* dulu sementara yang program ke Taiwan tetapi khusus yang terkait dengan politeknik. Kalo *lecture* nya itu terus pak, karena itu memang terkait dengan *lecture*. Lalu yang kedua kita juga tadi pagi masih ada pertemuan dengan Kementerian Perdagangan lalu Dikti, BNP2TKI, lalu Kemru itu akan membuat tata kelola penempatan untuk yang pendidikan ini. Yang ketiga kita juga akan membuat edaran dari Kemenaker ini terkait dengan kalo ada yang terlibat didalam beberapa *stake holder* kami misalnya PMI, P3MI itu kita akan usut. Lalu juga beberapa Pemda yang mengirim yang mengenai *internship* ini sudah mencabut MoU nya jadi seperti Bangka Belitung dan Subang itu telah mencabut MoU. Dan juga untuk lebih lanjutnya memang kita akan mengadakan pertemuan lanjutan. Kami mempunyai Atnaker disitu pak, sebenarnya Eselon III itu sudah melakukan pertemuan dengan berbagai tenaga kerja yang diduga untuk mendapatkan perlakuan tidak baik, tapi ternyata kita mempunyai ininya pak bukti bahwa mereka itu sebagian besar memang, hampir semuanya terutama yang di Tsing Hua University sudah di tanyai itu 175 mahasiswa itu tidak ada mengalami kerja paksa ataupun pemaksaan untuk makan daging yang haram. Jadi memang kami sebagai pemerintah bekerja sama dengan Kemendag telah menindaklanjuti dan tata kelolanya akan dibuat dalam beberapa hari ini terutama terkait dengan ijin untuk magangnya. Jadi sebenarnya kalo untuk universitas itu pak mereka itu memang wajib untuk 20 jam. Tetapi diberi kesempatan juga oleh pemerintah Taiwan untuk bekerja lebih, nah ini mungkin mereka juga karena semangat untuk bekerja itu memang terlihat seperti banyak pekerjaan. Tetapi pada intinya mereka sebenarnya hanya sekolah dan itu juga program resmi dari pemerintah Taiwan untuk bagi warga negara asing khususnya di negara-negara ASEAN.

#### **PIMPINAN :**

Jadi isu mereka dipekerja paksakan itu siapa pak yang buat pak?

## **DIRJEN BINAPENTA DAN PKK KEMNAKER RI :**

Kami sampai saat ini pak terutama Kementerian Ketenagakerjaan sudah berkoordinasi dengan KDI itu tidak, belum menemukan pak mungkin juga tidak menemukan tetapi sampai sekarang belum menemukan. Karena dari 175 orang yang telah di wawancarai dan dikumpulkan mereka sama sekali tidak merasa bahwa itu ada kerja paksa. Seperti itu. Nah ini memang karena ada viral pemerintah ini mem *freeze* untuk sementara, jadi memang kelihat seperti itu tetapi *freeze* nya juga berbeda kalo yang untuk yang *lecture* itu terus karena memang itu adalah pengikutan daripada perguruan tinggi, seperti itu pak. Lalu yang kedua mengenai, yang ketiga yang terkait dengan yang *one channel* ini pak tadi telah dijelaskan bahwa ini memang sebenarnya bermanfaat kalo ini kita lakukan. Sebenarnya sudah ditanda tangani tapi kita belum sampai sekarang ini belum karena memang kemarin kita sangat bersedih ada kasus Tuti Tursilawati sehingga kita memang *freeze* sebentar pak ini juga untuk mengingatkan bahwa kalo memang ada sesuatu hal di Arab Saudi itu harusnya diberitahu kepada kita. Jadi ini kita sedang lakukan pembenahan. Pertama mungkin terkait dengan apa yang mungkin dicurigai monopoli ini tidak ada pak ini tetap yang berkuasa adalah G to G adalah pemerintah kepada pemerintah. Jadi setiap *job order* itu masuknya masuknya itu melalui Atnaker, Atnaker itu akan membagi kepada PPTKIS atau P3MI yang akan ikut terlibat dalam ini. Di negara Arab itu sudah diseleksi di kita juga dengan persyaratan-persyaratan tertentu dan seleksi ini juga melibatkan berbagai kementerian. Pertama Kemnaker, BNP2TKI, lalu juga Kemlu, dan Atase. Jadi kalo ada P3MI yang memang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela misalnya ada salah itu memang tidak bisa ikut pak. Kedua memang pengalaman. Ketiga yang terkait dengan pelatihan kami juga nanti bekerja sama dengan Binalanttas dan juga tim vokasi yang sekarang ada pak untuk memang didalam persiapan-persiapan untuk peningkatan kualitas TKI nya itu lebih baik. Jadi kalo kita lihat memang monopoli kita tidak melihat sesuatu yang ada pak. Kita melihatnya bahwa pelaksananya adalah PPTKIS atau P3MI tetapi juga pengawasannya adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan. Bahkan tadi disebutkan oleh pak Sekjen *enjust* atau apa itu adalah dikuasai oleh pemerintah.

Untuk sementara itu aja pak, dan mungkin yang terakhir itu mengenai undang-undang seperti yang dikatakan oleh pak Sekjen tadi memang kita akan membentuk 3 PP lalu juga ada 2 Pepres, 5 Permen, dan 3 Perka. Yang paling krusial memang

mengenai pembentukan badan, ini sudah kita masukkan kurang lebih 4 atau 5 bulan yang lalu ke Menpan pak untuk melakukan, mereka akan melakukan koordinasi baik ke Kementerian Ketenagakerjaan maupun juga BNP2TKI. Karena juga memang dalam pembentukan unit itu adalah memang kekuasaan daripada otoriti daripada Menpan. Dan kita sudah melakukan pertemuan secara rutin dengan Menpan, dan Menpan juga sudah melakukan pertemuan dengan BNP2TKI dan Kemendagri karena ini juga bukan hanya berkaitan dengan Undang-Undang 18 tetapi juga Undang-Undang 23 karena kita ketahui didalam Undang-Undang 18 itu jelas ada perintah-perintah. Kalo dulu di Undang-Undang 39 tidak ada perintah bahwa pelaksanaannya adalah BP3TKI tapi Undang-Undang 18 jelas ada perintahnya desa, kabupaten kota, provinsi, jadi memang ini suatu perubahan. Mohon izin pak memang didalam suatu perubahan itu memerlukan suatu *effort* yang lebih tinggi, jadi ya kita koordinasikan ini dengan Menpan dan juga dengan Kemdagri terkait dengan Undang-Undang 23 dimana supaya tidak terjadi lagi, tidak terjadi lagi adanya suatu tumpang tindih diantara instansi pemerintah. Demikian yang mungkin yang bisa saya sampaikan terimakasih pak.

#### **PIMPINAN :**

Baik nanti didalam pada teman-teman. Mungkin ini satu lagi ni pak Satrio yang menjadi *concern* dari temen-temen karena mereka sudah kunjungan ke Dapil, reses baru yaitu terkait dengan BLK komunitas khusus di pesantren pak karena temen-temen sudah ikut membantu mensosialisasikan program ini ke Dapil masing-masing. Oleh karena itu temen-temen ingin denger kira-kira progresnya sudah sampai sejauh mana dan nanti kira-kira kapan bisa terwujud itu program itu. Karena saya dengar sudah ada yang survei juga, silakan pak Satrio.

#### **DIRJEN BINALATTAS KEMNAKER RI :**

**Terimakasih bapak pimpinan.**

**Yang saya hormati bapak ibu Pimpinan Komisi IX DPR RI.**

**Yang saya hormati bapak-bapak ibu-ibu Anggota DPR RI Komisi IX.**

**Dan juga pak Sekjen, pak Dirjen, bu Dirjen serta temen-temen dari Kementrian Ketenagakerjaan yang lainnya.**

Izinkan saya melaporkan masalah progres pelaksanaan untuk BLK komunitas pak. Sampai hari ini kita masih melakukan verifikasi dan hari ini kita tim kementerian Ketenagakerjaan sedang rapat untuk menentukan hasil verifikasi tersebut. Setelah itu nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati kami mohon ijin untuk mengundang TA bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membicarakan masalah hasil verifikasi tersebut. Karena dari hasil verifikasi tersebut ada beberapa yang harus ditindak lanjuti. Misalnya, tanahnya kurang. Misalnya tempatnya pak Mafirion dapat jatah 4, ternyata yang satu tanahnya tidak ada lha ini kan harus segera diganti. Umpamanya ini sekedar contoh saja. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain ada juga kepemilikannya tidak jelas, tidak bisa membuktikan kepemilikannya. Ada juga yang sudah kita datangi ternyata tidak siap diverifikasi, tidak mau diverifikasi, ada beberapa catatan kami pak. Oleh karena itu hari ini kita tim surveyor dari kementerian Ketenagakerjaan sedang rapat nanti dalam satu dua hari kami mohon izin bapak-bapak dan ibu-ibu kalo TA nya di undang bisa datang ke kementerian Ketenagakerjaan untuk klarifikasi ini pak. Karena ada beberapa yang, contohnya di tempat pak Daulay itu harus merubuhkan rumah dinas, ada catatan kami. Nah rumah dinas ini kita informasi rumah dinas ini milik siapa gitu, kalo milik pesantrennya ya tidak apa-apa kalo milik pemerintah kan tidak mungkin dirobohkan pak. Ini salah satu contoh saja kasus. Ada pak verifikasi dari kami. Makanya nantinya kami ingin koordinasi dengan TA nya bapak-bapak ibu-ibu sekalian pak.

**PIMPINAN :**

Rumah dinas pesantren?

**DIRJEN BINALATTAS KEMNAKER RI :**

Nah ini justru kita pengen klarifikasi pak, ini punya siapa sebenarnya? Oke, ya gitu pak. Terimakasih pak.

***Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**PIMPINAN :**

Itu yang rumah-rumah dinas itu punya saya? Di dapil saya? Oh nggak betul itu. Nanti coba saya cek. Jangan saudara-saudara tertawa ya.

## **DIRJEN BINALATTAS KEMNAKER RI:**

Mohon maaf bapak pimpinan, bapak pimpinan mohon maaf, ini contohnya di padang lawas pak. Ini pondok pesantren Bapul Khasanah, ini punya bapak. Ini adalah ada bangunan yang harus di bongkar. Nah ini kan harus kita klarifikasi bangunan ini adalah maksudnya kepemilikannya siapa begitu lho pak.

## **PIMPINAN :**

Baik, saya tahu kalo Bapul Khasanah pak, Bapul Khasanah kenapa tu kaya begitu pak? Karena TA saya dateng kesitu itu utusan bapak yang survei itu mengatakan itu ngga ada urusan pak Saleh Daulay ini. Nggak saya nggak ngasih tahu ini, kalo begitu modelnya ya kita nggak bisa komunikasi sama mereka. Itu mestinya TA saya ada disitu pak untuk mendiskusikan itu bagaimana solusinya, ini kalo orang situ kan nggak paham. Nah itu tolong di tertibkan juga yang survei-survei jangan dibilang juga bukan anggota DPR yang nunjuk. Iya kan nanti dipikir orang kita nggak kerja di DPR ini, padahal kan kita pingin supaya menunjukkan prestasi yang dilakukan untuk masyarakat. udah ini udah yang penting-penting udah saya tanyakan ini ke Kementerian Ketenagakerjaan, tinggal sekarang elaborasi apa yang sudah disampaikan semua. Sebetulnya ada untuk urusan apa Dirjen PHI dan juga Dirjen PPK dan K3, tapi nanti lah nanti bu Ermalia akan tanya. Nah sekarang saya minta teman-teman yang mau melakukan pendalaman silakan. Sebelah kiri siapa ini? Pak Kaidir, nanti abis itu pak Mafirion, ada lagi? Sebelah kanan pak, pak Julianus. Ya mohon maaf pak Handayani, oke kita mulai dulu dari kiri pak Khaidir.

## **FP- GERINDRA (Tgk. KHAIDIR ABDURRAHMAN, S. IP) :**

**Baik**

***Bismillahirrahmanirrahim***

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh***

**Pimpinan dan anggota Komisi IX yang kami hormati.**

Bapak ibu dari Kemenaker yang sudah hadir, berkenaan ini yang terakhir tadi pak ketua sampaikan yang berkenaan dengan BLK komunitas. Nah dari informasi yang kita dapat bahwa kemarin setiap anggota itu untuk bisa membantu 4 lokasi yang akan disampaikan kepada Kementerian. Tapi yang terjadi di Aceh mohon maaf bapak,



mungkin ini *off the record* aja. Selain daripada kami itu ada oknum-oknum lain yang datang nawarin ke pondok pesantren. Ternyata di pondok pesantren yang ditawarkan itu sudah dahulu kita yang ambil sebagai calon lokasi, nah jadi apakah itu memang dari Kemenaker sendiri atau memang itu dari orang luar kita tidak tahu identitasnya. Tapi yang pasti pak siapa saja yang berperan untuk mendapat lokasi-lokasi itu terutama di Dapil Aceh ya yang pengalaman kami yang seperti itu. Maka kalau demikian kebetulan hari ini rapat seperti ini kami ingin dengar langsung apakah memang ada orang lain yang dikirim dari Kemenaker ataukah ada pihak lain yang bekerja untuk mendapatkan lokasi-lokasi yang dibutuhkan untuk BLK komunitas ini, saya kira demikian pimpinan. Terima kasih.

**PIMPINAN :**

Baik sebelah kanan pak tadi tadi yang pertama Julianus ya? Silahkan. Oh pak Emanuel? Ini Anda bagaimana si Julianus itu sana. Oh iya, ini pak Emanuel ini, silahkan pak Emanuel.

**F-GOLKAR (IMANUEL EKADIANUS BLEGUR) :**

**Terima kasih pimpinan.**

**Bapak Sekjen Depnaker dan teman-teman dari Depnaker yang kami hormati.**

Yang pertama kami perlu memberi apresiasi kepada Depnaker yang berhasil mencapai kesepakatan dengan pemerintah Arab Saudi tentang pokok-pokok perubahan sistem penyaluran tenaga kerja di Arab Saudi. Dengan dampak-dampak yang cukup signifikan indikasi yang paling kuat adalah penurunan jumlah pengaduan. Dari 1080an menjadi 350an, ini satu perkembangan yang menggembirakan dan kami memberi apresiasi yang tinggi pada prestasi ini. Namun yang kedua yang tadi disampaikan pimpinan, apa tindak lanjut dari kesepakatan-kesepakatan itu seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak Dirjen mungkin ini perlu dipercepat karena memang keluhan-keluhan tenaga kerja kita di luar negeri khususnya di Arab Saudi masih berkenaan dengan berbagai soal yang sudah di sepakati dengan butir-butir pembaharuan ini. Ini yang pertama, yang kedua soal pendidikan vokasional. Terima kasih karena ada satu introdusir dari sistim pendidikan vokasi yang bagus atau akan memberi kontribusi positif terhadap pembangunan Ketenagakerjaan Indonesia. Saya

hanya ingin mengangkat satu case yang mudah-mudahan bisa diantisipasi oleh Depnaker dan khususnya bersama kerja sama dengan Diknas yaitu pengembangan blok masela yang menurut informasi hasil kunjungan ke Dapil, informasi yang kami terima itu akan merekrut kurang lebih 390.000 tenaga kerja baru dan 39.000 di antaranya adalah tenaga kerja yang menguasai atau memiliki kompetensi di bidang teknis industri tetapi selebihnya itu non teknis industri. Itu berarti ada peluang yang cukup besar bagi kita antara Depnaker maupun kerja sama dengan Diknas, bagaimana mengembangkan pelatihan-pelatihan vokasional di daerah NTT ataupun di Indonesia yang bisa memberi kontribusi terhadap rekrutmen tenaga kerja di blok masela. Saya kira ini jumlah cukup signifikan, apa kira-kira pikiran dari Depnaker untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja ini? Saya lihat dalam skema pendidikan pelatihan vokasi ini seharusnya tanggung jawab pemerintah adalah membangun atau mengembangkan BLK-BLK yang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja. Pertanyaan saya secara khusus adalah apa antisipasi Depnaker untuk melakukan pelatihan vokasional di daerah NTT atau daerah yang terdekat dengan blok masela dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang mungkin sudah akan dimulai pada tahun 2020 yang akan datang.

Kemudian yang berikut adalah soal peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 2003. Kalau kita baca *reason detrays* dari undang-undang ini maka salah satu yang paling penting adalah berkenaan dengan bagaimana melalui undang-undang ini terwujud peningkatan kesejahteraan para buruh, para pekerja. Yang kedua perlindungan khususnya dalam bentuk pesangon. Masalah-masalah Ketenagakerjaan di Indonesia khususnya di Jawa atau daerah-daerah yang memiliki industri, paling banyak muncul adalah soal pesangon. Sementara Depnaker belum mewujudkan peraturan pemerintah yang mengatur lebih teknis penjabaran Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 khususnya tentang pesangon koperasi dan fasilitas peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu pertanyaan saya sederhana apa antisipasi dari Depnaker supaya mengurangi juga persoalan-persoalan pesangon yang marak di berbagai tempat khususnya pusat-pusat industri di Indonesia. Saya kira Cuma 3 hal ini yang ingin kami sampaikan, terima kasih pimpinan.

**PIMPINAN :**

Baik kita kekiri, yaitu pak Mafirion. Silahkan.

**F-PKB (H. MAFIRION) :**

**Terimakasih pimpinan.**

**Rekan-rekan Anggota Komisi IX, bapak ibu dari Kementerian Ketenagakerjaan yang saya hormati.**

Ada 3 hal penting yang dibahas hari ini adalah pertama *one channel*, yang kedua akses dan mutu, yang ketiga kebijakan sosial. Kalo melihat konsep dari yang disampaikan pak Sekjen tadi soal *one channel* bagus memang konsepnya, tetapi ini harus terus menerus disampaikan kepada publik.

**F-PKB (H. MAFIRION) :**

Disamping itu saya di wawancarai wartawan. Pertanyaannya, bener ngga itu, eh Komisi IX dapat menerima nggak pemerintah memberikan hak kepada satu perusahaan untuk mengirimkan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja ke Arab Saudi? Bukankah itu monopoli? Nah ini kita mengingatkan bahwa memang selalu saja kebijakan-kebijakan pemerintah yang bagus itu tidak diikuti dengan sosialisasi yang bagus di tengah masyarakat. Akhirnya penerimaannya seperti itu. Nah jadi harus dibuatkan penjelasannya sederhana. Yang saya pahami adalah *one channel* itu adalah hubungan antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia, dimana nomor punggung dari penempatan tenaga kerja itu diberikan kepada pemerintah, pemerintah lalu memberikan nomor punggung itu kepada perusahaan-perusahaan yang sudah lulus verifikasi. Yang kedua bahwa perusahaan di masa depan dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri khususnya ke Arab Saudi terpisah antara perusahaan penempatan dengan perusahaan pelatihan. Jadi itu mungkin perlu dijelaskan sehingga tidak ada kesan di masyarakat bahwa anggota DPR terutama Komisi IX membiarkan pemerintah memberikan hak monopoli kepada satu lembaga. Nah itu perlu di jelaskan hal seperti itu. Jadi misalnya pak Saleh, pak Ichsan terutama pimpinan-pimpinan Komisi IX tidak repot menjawab hal-hal yang salah pengertian akibat pemerintah tidak peduli dengan persoalan ini. Yang pertama. Yang kedua, dengan sistem yang baik ini harus dijaga dengan baik, harus dijaga dengan baik, dijaga dengan baik, diperhatikan dengan baik, di evaluasi dengan baik,

tidak bisa dibiarkan. Untuk itu Kementerian Ketenagakerjaan tidak boleh sendiri, nanti jangan misalnya jangan hanya abjati saja yang di evaluasi, aspeknya tidak di evaluasi, umpamanya begitu. Aspeknya nanti datang lagi ke Komisi IX, nah itu harus didudukkan benar bahwa *one channel* bukan pengertiannya adalah satu perusahaan memonopoli pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Itu perlu penjelasan, supaya pak Saleh tidak emosi nanti. Diberi penjelasan, begitu pak ketua ya? Itu yang pertama, oh yang kedua ya? Yang ketiga? Ah yang ketiga kita juga harus mendapatkan penjelasan apakah penempatan PMI ke Saudi ini menggunakan kuota? Kalau dia menggunakan kuota berapa besar pemerintah Arab Saudi memberikan kuota kepada kita? Itu belum pernah dijelaskan kepada kita, atau kita yang memberikan kuota kepada mereka, bahwa dia minta 100.000 kita cuma sanggup 70.000 nah itu seperti apa itu belum pernah dijelaskan kepada kita pak Sekjen, eh pak Dirjen. Itu dijelaskan kepada kita sehingga kita ini tahu. Jangan suatu hari nanti tiba-tiba ada orang dikirim 100.000, 30.000 bermasalah. Begitu ketua ya? Itu yang ketiga ketua.

Yang lainnya adalah tadi pak Sekjen juga menjelaskan soal menghadapi industri 4.0 dimana bukan hanya terjadi perubahan perilaku, tetapi ekosistem kita berubah. Dan industri empat kosong ini bukan mempermudah manusia, kalo 3 revolusi industri sebelumnya dia mempermudah manusia revolusi ke 4 ini dia membunuh manusia. Dia menjadi pesaing manusia, untuk itu dengan penjelasan soal akses dan mutu kita juga ingin mendengarkan apa yang sudah dilakukan Kementerian tenaga kerja dalam kaitan akses dan mutu ini. Karena memang sampai hari ini, kemarin kita Kemen ini Komisi IX sudah membentuk panja BLK karena memang sebagian besar sudah dikunjungi oleh Komisi IX BLK-BLK yang hidup, merana, setengah hidup, mati, dan sudah mati. Nah apa yang mesti dilakukan dan berapa jumlahnya juga tidak kecil ada sekitar 287 BLK yang hidup segan mati tak mau, itu apa yang sudah dilakukan kementerian tenaga kerja dalam konteks akses dan mutu kalo memang Kementerian Tenaga Kerja mau membangun BLK yang baru itu tidak mungkin. Bukan hanya tidak mungkin pada waktu tetapi juga tidak mungkin dari segi pembiayaan. Nah itu apa yang sudah dilakukan? Tetapi persoalan BLK-BLK yang akan dijadikan sebagai bagian dari akses dan mutu itu bukan hanya kekurangan peralatan latihan tetapi juga tak ada instruktur. Jadi ketika mereka berpindah dari Departemen Tenaga Kerja dulu di tahun 2000, 2001, 2002, 2003 hari ini instrukturanya itu adalah peninggalan dari Kementerian Tenaga Kerja yang sudah mau habis.

Misalnya dulu ditinggalin 30, kemarin kita mengunjungi di satu tempat bersama ketua Ihsan hanya tinggal 3 orang itu bagaimana kelanjutannya? Dengan angka 1,4 juta dimana 1,4 juta itu mungkin 500.000 berada di kementerian lain dan 500.000 berada di jaringannya Kementerian Tenaga Kerja itu apa yang sudah dilakukan? Sehingga konsep ini tidak menjadi sia-sia dan peralihan industri 4.0 itu tidak hanya ucapan, tidak hanya retorika saja, hari ini semua orang ngomong itu tapi dia tak ngerti dia ngomong apa 4.0 jangan sampai Kementerian Tenaga Kerja juga tak mengerti apa itu 4.0 hanya di ucapkan saja. Peralihan itu apa sih? Apa makna sesungguhnya? Apakah dia akan memberikan titik terang, atautkah dia akan membunuh kita semua. Itu perlu dijelaskan kepada kita.

Yang ketiga adalah kalau ini seperti ini yang terjadi pekerja miskin akan makan besar. Karena memang mereka akan kehilangan *job*, jadi *job* akan kehilangan, industri tutup, saya itu belum mendengar apa yang sudah dilakukan Kementerian Perindustrian terhadap peralihan ini, tetapi yang saya bayangkan adalah akan tumbuh pekerja miskin dalam angka yang besar, dalam angka yang sangat besar. Mungkin pada angkanya mungkin dibawah 30 juta orang akan menjadi miskin dengan peralihan ini. Kalau itu tidak diantisipasi itu berat. Antisipasinya adalah tadi sudah dijelaskan pak Sekjen kebijakan sosial, saya mau tahu kebijakan sosial ini sudah sampai mana pembicaraannya? Dan kapan akan dilaksanakan? Kalau dia hanya tatanan konsep tahun depan kita akan menghadapi pekerja miskin yang cukup besar, *working poor* nya besar begitu lho.

Untuk itu memang harus segera di gesa BPJS Ketenagakerjaan untuk menginvestasikan sebagian uangnya mungkin satu, dua Triliun untuk mengantisipasi pekerja miskin ini. Kita Komisi IX juga berpesan kepada Kementerian tenaga kerja ingatkan BPJS Tenaga Kerja, dia dibangun, dibuat oleh negara bukan untuk mengutip iuran, yang dia lakukan sampai hari ini ialah BPJS Ketenagakerjaan itu adalah agen pengutip iuran. Jadi setiap hari yang dia pikir itu iuran saja, dia tidak mengembalikan iurannya kepada pekerja yang nanti meningkatkan pendapatannya yang kemudian punya kemampuan yang tinggi untuk membayar iuran. Itu perlu diingatkan dan BPJS tenaga kerja ini juga diingatkan. Beberapa pertanyaan kita sampai hari ini tidak di jawab, nah itu diingatkan. Jadi dia bukan lembaga pengutip iuran, dia lembaga dibangun memberi perlindungan dan peningkatan kapasitas pekerja untuk kebaikan di masa depan. Itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sekali lagi

bahwa Kementerian tenaga kerja bagus konsepnya tetapi tolong terus dilakukan evaluasi, dipantau, dan dilaksanakan. Untuk yang terakhir kita minta segera mungkin pak Sekjen disampaikan, mungkin besok diampaikan kepada kita untuk bantuan BLK komunitas itu, itu berapa yang sudah di survei dan berapa yang belum di survei? Sehingga ketua Saleh tidak repot menjawab pertanyaan Anggota, kami belum di survei ketua, kami belum di survei, akhirnya ketua Saleh tanya kepada saya seperti saya ini menjadi agen survei pula kan seperti itu ketua. Nah jadi segera saja disampaikan, jadi ketua saya dalam kesempatan ini menyampaikan saya bukan agen survei ya ketua, jadi langsung ketua tanyakan saja kepada itu, terima kasih.

***Wabillahitaufilwalhidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.***

**PIMPINAN :**

Kolom sebelah kanan pak Handayani. Silakan.

**F-PKB (H. HANDAYANI, SKM) :**

**Terima kasih pimpinan.**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.**

**Yang saya hormati pimpinan, rekan-rekan Anggota DPR Komisi IX, Pak Sekjen dan pak Dirjen.**

Saya hanya menyampaikan masalah magang kuliah di Taiwan. Saya ini ada tawaran juga ini pak, yang pertama yang saya tanyakan ijazahnya berlaku tidak di Indonesia? Yang kuliah di Taiwan itu ijazahnya berlaku tidak di Indonesia? Itu pertama, dan juga itu paspornya paspor apa? Paspur yang untuk dikirim itu, saudara bagaimana perlindungan masalah tenaga kerjanya, kesehatannya bagaimana? Dan juga disini saya ada tawaran besok tanggal 19 ini ada interview katanya, yang datang itu dari Taiwan itu dari kampus cienko, cienko. Mungkin kalo seandainya memang dari tenaga kerja bisa hadir nanti saya sampaikan nanti hadir saja gitu apa yang akan disampainya, nanti tolong dilihat apa yang disampainya oleh orang itu. Dan juga ini mereka pungut biaya, pungut biaya itu sebenarnya 35 juta satu mahasiswa, tapi bisa bayar 7 juta ini saya ada di saya ini 7 juta nah nanti sisanya itu uang itu digajinya yang sekitar 18 juta itu nanti dipotong dari situ per bulannya. Nah yang saya tanyakan lagi ini perguruan tinggi ini kerja sama dengan perusahaan itu bagaimana? Apa

perusahaan yang tempat mereka kerja ini punya Universitasnya, apa dia ada kerjasama lagi universitas ini dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Taiwan itu.

Ini yang akan datang tanggal 19 itu adalah rektornya langsung dari Kapuchiko ini rektornya langsung pak. Itu saja pak, sebenarnya kalo seandainya memang ini baik, bagus, ya ijazahnya legal di Indonesia bagus juga. Tapi bayarannya ini yang saya jadi tanya betul gak bayar begitu. Demikian saja pimpinan, bapak ibu sekalian terima kasih.

***Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**PIMPINAN :**

**Terimakasih pak Handayani.**

Berikutnya sebelah kiri pak Irgan Khairul Mahgis, silahkan. Sudah tadi? Oke yang lain sebelah kiri pak Julianus Pote silahkan.

**FP-GOLKAR (Drs. JULIANUS POTE LEBA, M.Si) :**

**Terima kasih pak pimpinan.**

**Bapak-bapak dan Anggota Dewan yang terhormat.**

**Bapak-bapak dari Kementerian Tenaga Kerja.**

Saya hanya melihat di poin pertama tentang kompetensi bahasa mandarin. Ini kan rata-rata pencari kerja kita ini kan bukan tamatan pendidikan yang tinggi. Tapi rata-rata itu mungkin paling tinggi itu SMA. Nah dalam pendidikan formal kita di republik ini kan tidak ada bahasa mandarin di ajarkan, terus dalam kesepakatan kita dengan Taiwan standar apa yang kita pakai? Untuk menyatakan seorang PMI itu layak bekerja di Taiwan. Kalo pakai standar akademis saya kira tidak akan ada yang layak begitu. Itu yang pertama, yang kedua, PKI atau PMI yang meninggal dunia khususnya kami di NTT itu terakhir itu jumlahnya 150an orang sampai hari ini. Apakah kementerian Ketenagakerjaan juga tidak berpikir bahwa sebelum meloloskan seorang calon tenaga kerja juga agar diperhatikan kesehatannya. Memang 95% dari yang meninggal itu karena sakit, nah itu. Nah ini akibat apa? Akibat dari tidak ketatnya ketika mengurus dokumen perjalanan. Yang disiksa hampir tidak ada, nol koma sekian persen tapi yang meninggal ini khususnya NTT karena sakit. Itu yang kedua, yang

ketiga beberapa bulan yang lalu Komisi IX juga menerima *audience* dari pekerja jalan tol. Nah ini ada kaitannya dengan digitalisasi industri 4.0 itu. Dan sampai dengan sekarang kita masih lihat di jalan tol kadang-kadang ada antrean, antrean itu diakibatkan karena pengemudi tidak memiliki sisa pulsa yang cukup dalam kartunya. Nah ini akibat karena tidak ada disitu pengganti, kita tidak mengantisipasi. Bapak-bapak bisa membayangkan kalau pengemudi dibelakangnya tidak memberi tidak baik hati meminjamkan kartunya maka akan terjadi apa namanya antrean yang cukup panjang kemacetan disitu. Memang kita bilang itu kewajiban pengemudi tapi mereka juga tidak luput dari masalah manusia bahwa faktor apa namanya itu kesibukan faktor lupa juga ada, tetapi kita sebagai fasilitator harus memberi peluang harus memberi kemudahan agar tidak terjadi kemacetan di jalan tol. Nah waktu itu ada sekitar 700-800 pekerja jalan tol yang di PHK, kami juga ingin tahu yang sudah di PHK itu di apakan? Saya kira ini beberapa hal bapak ketua, terima kasih.

**PIMPINAN :**

Baik, ada lagi? Pak Jalaluddin Akbar silakan.

**FP-HANURA (JALALUDDIN AKBAR R, S.H) :**

**Makasih pimpinan sidang.**

**Pak Sekjen, pak Dirjen.**

Jadi barangkali saya ingin bertanya ini kaitan dengan kemarin di fraksi kami sempat menerima ada aduan. Jadi mungkin sifatnya *case* yang saya akan tanyakan untuk satu poin terkait dengan permasalahan awak mobil tangki di salah satu BUMN Pertamina. Kalo tidak salah pada PT. Pertamina Patra Niaga itu yang kemarin sempat menjadi bahan pembicaraan dan viral di media sosial. Saya melihat bahwa ada hal yang mereka tuntutan di satu sisi juga BUMN ini punya alasan lain terkait dengan masalah PHK pihak yang dilakukan. Kami menganggap bahwa karena Patra Niaga disini dalam hal kaitan dengan tuntutan selalu bertahan kepada proses mekanisme hukum, kami menganggap bahwa kalau mekanisme hukum yang selalu di kedepankan bukan dalam artian kita tidak mau menyalurkan masalah masyarakat tidak mau menyalurkan masalahnya ini akan memakan waktu dan panjang. Jadi saran kami ya pimpinan sidang, kami mohon Depnaker, kementerian Ketenagakerjaan dan



jajaran kalo bisa masalah ini bisa di selesaikan non hub yudisi. Kemudian, kami juga selama ini memonitoring kami dengan praktik penggunaan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan besar yang memakai tenaga-tenaga kerja yang cukup banyak. Ini mereka kelihatan pakai akal-akalan, iya beberapa apa namanya semacam supermarket yang gede-gede itu yang besar-besar itu mereka dalam merekrut pekerja itu ada masa-masa tertentu mereka memberhentikan *automaticly*, kemudian kali misalnya mereka masih mau dipakai disuruh bermohon kembali, iya ini kelihatannya ini untuk menyasati aturan ketenagakerjaan untuk mereka menjadi tenaga kerja yang tetap. Ya salah satu contohnya tidak papa saya sebutkan misalnya seperti carrefour, perusahaan-perusahaan besar yang seperti ini. Jadi mereka pekerja itu setelah bekerja sekian bulan ada waktunya mereka dianggap sudah berhenti untuk mereka bisa bekerja kembali bermohon kembali, jadi zero kilometer kembali. Nah ini merugikan mereka sudah buang waktunya bekerja dengan baik tidak ada masalah kok disuruh mundur dan buat permohonan baru. Kemudian mohon ijin barangkali pimpinan sidang, bapak ibu yang kami hormati ini kebetulan mungkin masalah ini sudah lama dan sudah menjadi buah bibir juga kami mohon penjelasan sekali lagi ini terkait dengan isu ya, isu adanya mobilisasi tenaga kerja asing di Indonesia. Ini barangkali tidak papa, tidak papa kita selalu beri informasi kepada masyarakat karena ini berkembang terus seperti gunung es. Ini menggelinding terus seolah-olah pekerja asing ini sudah luar biasa masuknya di Indonesia dan tidak terkendali, seperti itu. Terima kasih.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.***

**PIMPINAN :**

Baik saya kira sudah cukup ya semua sudah memaparkan. Pak Zul masih mau bicara silahkan pak Zul.

**FP-DEMOKRAT (Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD) :**

***Bissmillahirrahmanirrahim.***

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.***

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang saya hormati ketua, wakil ketua, rekan-rekan Komisi IX yang saya hormati.**

**Pak sekjen beserta jajarannya.**

Saya belum lama ke Hongkong, saya melihat tenaga kerja kita ditaman dan kota itu taman apa itu saya nggak jelas namanya. Itu saya lihat tenaga kerja kita terutama yang perempuan itu rambut kuning-kuning berpeluk-pelukan sesama perempuan, pakai celana pendek, ini tidak menunjukkan bahwa orang Indonesia itu mempunyai adat.

**FP-DEMOKRAT (Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD) :**

Apa agamanya apa saya tidak tahu. Adakah program Depnaker ini untuk mengirimkan penceramah agama, baik itu Islam maupun Kristen. Ini sangat memalukan ya, nah ini satu. Kedua tadi masalah pondok, Muara Bungo sama Jambi itu saya pemilikan tanahnya itu belum sertifikat itu pak. Termasuk saya punya yang Nurul Haq itu pondok pesantren saya ada 5 hektar tanahnya, nah Cuma saya belum sempat membikin sertifikat. Itu baru akte jual beli saya dengan masyarakat, itu yang punya juga ada 10 orang saya beli semua itu yang ada disitu nah itu bagaimana? Sudah ada di Sarolangun, dan Merangin, Muara Bungo ada dua. Apa bisa dengan kepemilikan yang akte jual beli itu saja? Satu.

Sudah itu pondok pesantren ini sangat berterima kasih sekali minta disampaikan kepada Depnaker belum dibangun tapi sudah terima kasih dulu. Apa dapat apa enggak ini, itu kalo bisa nambah lagi. Juga jalan di pedesaan itu pak Dirjen yang saya resmikan itu yang dari Depnaker itu berterima kasih benar itu masyarakat. berapa ratus meter itu, itu saya sendiri yang meresmikannya. Jadi masyarakat minta sampaikan terima kasih sekali, yang tidak pernah desa itu dimasuk oleh pimpinan, pejabat disana tapi saya sebagai wakil rakyat saya datang kesana, saya disitu saya tujukan untuk swadaya masyarakat itu jalan yang kita berikan itu. Nah itu sementara ketua, terima kasih.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.***

**PIMPINAN :**

Baik, sudah cukup ya. Kita kembalikan ke pak Sekjen dan para pejabat lain dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjawab dan memberikan respons terhadap pendalaman yang dilakukan oleh teman-teman dari Komisi IX. Silakan.

## **SEKJEN KEMNAKER RI :**

Terima kasih bapak Pimpinan. Mohon ijin bahwa pimpinan supaya lebih *clear* kami mohon ijin bapak Dirjen dimulai dari pak Dirjen Binalanttas, Binapeta lanjut ke ibu Dirjen PHI. Dipersilahkan pak Dirjen.

## **DIRJEN BINALATTAS KEMNAKER RI:**

**Terima kasih pak Sekjen.**

**Bapak-bapak pimpinan Komisi IX yang saya hormati.**

**Bapak-bapak ibu-ibu anggota Komisi IX yang saya hormati.**

Izinkan saya untuk menjawab beberapa hal tadi yang dipertanyakan oleh para anggota dewan Komisi IX. Pertama dari pak Khaidir, pak Khaidir mohon maaf tidak ada perintah dari kami untuk menawar-nawari pak. Jadi kemungkinan ada oknum yang memanfaatkan situasi seolah menjadi calo, tetapi kita semuanya melaksanakan tugas sesuai dengan SOP sesuai dengan Juklak yang ada pak. Tapi informasi ini sangat penting bagi kami untuk kami klarifikasi kami selidiki lagi pak, mudah-mudahan dalam rangka untuk pembangunan BLK komunitas nanti kita bisa bekerja dengan baik sebaik-baiknya pak. Informasi terima kasih pak.

## **FP- GERINDRA (Tgk. KHAIDIR ABDURRAHMAN, S. IP) :**

**Ijin pimpinan, mungkin sedikit saya pendalaman.**

Begini pak Dirjen bahwa sesungguhnya yang datang kesana itu kita tidak tahu latar belakang dari mana tapi mereka mengaku dari Komisi yang lain selain dari Komisi IX. Dia mengaku bahwa TA dari anggota Komisi tertentu dan katanya ada pembangunan BLK komunitas yang bersumber dari Kemenaker. Apakah ini fasilitas yang kita terima di Komisi IX ini bagi anggota 4 unit ini per anggota, apakah juga diterima juga oleh Komisi yang lainnya yang bukan mitra kita.

## **DIRJEN BINALATTAS KEMNAKER RI :**

Tidak ada pak. Selanjutnya dari pak Imanuel masalah pengembangan birokrasilah yang membutuhkan sekian banyak tenaga kerja itu kami sejak tahun 2018 sudah berkoordinasi tentang kebutuhan-kebutuhan pekerjaan apa, jabatan apa yang

dibutuhkan untuk pengembangan blok masela dan kami sudah mulai melakukan pelatihan pak. Dan kami selalu mencari informasi tentang kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan disana. Tentunya sesuai dengan kapasitas kami khususnya BLK Ambon dan BLK Serang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut tapi kami juga berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga lain yang melakukan pelatihan juga karena disamping Kementrian Ketenagakerjaan ada 13 Kementerian lain Kementerian dan lembaga lain yang melakukan pelatihan-pelatihan vokasi juga pak, jadi kita koordinasikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tadi blok masela dan bukan hanya blok masela tapi kami juga sudah memetakan lokasi-lokasi untuk prioritas pembangunan nasional misalnya, kawasan ekonomi khusus dan lain-lainnya pak. Ini kami sudah melakukan kesana pak. Selanjutnya pak Mafirion tapi maaf pak Mafirion nggak ada tapi.

**F-GOLKAR (IMANUEL EKADIANUS BLEGUR) :**

**Pimpinan, mungkin satu pertanyaan tambahan.**

Oke ada BLK Serang dan BLK Ambon, saya kira blok masela itu lebih dekat ke NTT daripada ke Maluku dan Maluku Tenggara Barat ke Serang. Dari pulau Alor misalnya di NTT dengan *speed* cuma satu jam kalo ke blok masela. Fakta menunjukkan bahwa sumber penerimaan tenaga kerja ke luar negeri PMI paling banyak itu juga dari salah satu yang terbanyak itu dari NTT, karena itu bagaimana mengantisipasi pendirian BLK di NTT di Kupang misalnya untuk sekaligus nimbrung selain 2 BLK yang lain untuk ikut serta mempersiapkan tenaga kerja, jadi punya dua tujuan sekaligus, memenuhi kebutuhan di blok masela sekaligus juga mengurangi pengiriman tenaga kerja yang pada umumnya secara ilegal dikirim ke luar negeri. Terima kasih.

**DIRJEN BINALATTAS KEMNAKER RI:**

**Terima kasih pak Imanuel.**

Jadi untuk tahun 2019 ini seluruh pelatihan di BLK-BLK di seluruh Indonesia adalah pembiayaannya dari Kementerian Ketenagakerjaan termasuk BLK Kupang, BLK yang ada di NTT sana pak. Jadi seluruhnya kita dukung sesuai dengan kapasitas BLK tersebut, kami sudah ngumpulkan seluruh kepala BLK jadi kapasitasnya apa,

pelatihan yang akan dilakukan apa, semuanya kita biayai pak. Sehingga nanti dari berbagai BLK bisa untuk mendukung di kawasan-kawasan industri yang membutuhkan tersebut pak.

#### **F-GOLKAR (IMANUEL EKADIANUS BLEGUR) :**

Kemarin saya ke BLK di Kupang mereka nggak punya persiapan apa-apa, nggak punya program apa-apa mengantisipasi ini blok masela. Sehingga mungkin butuh koordinasi dari Naker.

#### **DIRJEN BINALATTAS KEMNAKER RI:**

Mungkin kebetulan pak Imanuel saya laporkan di akhir minggu ini kita akan rakor dengan seluruh kepala BLK nah ini nanti kita akan arahkan kesana pak. Terima kasih pak. Selanjutnya yang pak Mafirion, apa yang sudah dilakukan oleh Kemnaker dalam rangka penguatan akses dan mutu pelatihan dan kita kaitkan dengan revolusi industri generasi ke 4 ini memang benar sekali seperti apa yang dikatakan pak Mafirion ini bahwa revolusi industri generasi yang sekarang ini akan menggerus berbagai pekerjaan bahkan menghilangkan berbagai pekerjaan tetapi juga akan menumbuhkan pekerjaan-pekerjaan baru. Dan disini Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengidentifikasi, membuat pemetaan jabatan-jabatan baru, misalnya berkaitan dengan revolusi industri generasi ke 4 ini masalah digitalisasi, misalnya jabatan-jabatan perancang grafis multimedia, terus spesialis periklanan, pengembangan situs, pemrograman aplikasi, termasuk youtuber, termasuk pembuatan game dan lain-lain sebagainya itu sudah kita siapkan. Oleh karena itu Kementerian Ketenagakerjaan kebijakan dalam hal ini adalah melakukan program 3R yaitu Reorientasi, Revitalisasi, dan *Reborn*ing BLK. Dimana Reorientasi ini adalah me reorientasi lagi, mengkaji lagi kejuruan-kejuruan yang ada di BLK dimana kejuruan-kejuruan yang sudah tidak begitu di butuhkan kita lakukan Reorientasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pekerjaan, kebutuhan-kebutuhan ketrampilan yang akan datang. Contohnya di BLK Bekasi sudah kita lakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan di masa mendatang, banyak sebagai pembuat game, animator dan sebagainya dan kita juga disana punya *in question room* yang untuk melakukan pengembangan kejuruan-kejuruan yang dibutuhkan di masa depan. Begitu juga

beberapa BLK contohnya BLK Semarang juga kita rombak tadinya hanya kejuruan menjahit menjadi *fashion* teknologi yang nantinya kemampuan BLK tersebut bukan hanya menciptakan operator mesin jahit tetapi juga perancang busana, juga termasuk pemasar dan lain sebagainya itu sudah kita lakukan. Dan dalam rangka untuk mengoptimalkan penguatan akses ini kita sudah membuka seluruh persyaratan-persyaratan yang ada, artinya kita tidak lagi mensyaratkan sesuatu, umpamanya pendidikan atau umur dan kita juga bersinergi dengan Pemda seperti tadi yang saya katakan bahwa seluruh pelatihan akan kita biayai dan Pemda tetap menganggarkan untuk BLK dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas BLK, misalnya untuk membangun gedung, merenovasi gedung dan lain sebagainya sehingga kedepan secara perlahan BLK juga semuanya kita harapkan menjadi kondisinya baik semuanya. Benar juga yang dikatakan bahwa sekarang kita kekurangan instruktur, jadi saat ini ada 333 BLK kebutuhan instruktur nya itu ada 8.000 saat ini yang ada baru 3.000 oleh karena itu kita juga berkoordinasi bersinergi dengan pihak ketiga dalam rangka untuk melaksanakan pelatihan di BLK-BLK tersebut, misalnya teman-teman dari industri, teman-teman dari LPK dan sebagainya yang mempunyai kemampuan mengajar kita bersinergi dengan mereka untuk melengkapi kebutuhan kita, menutupi kebutuhan kita. Biasanya kalo teman-teman dari industri dia memiliki kemampuan teknis yang bagus hanya metodologisnya yang kurang oleh karena itu sebelum mereka menjadi instruktur di BLK kita bekal dulu pelatihan metodologi. Tahun 2018 kita sudah melatih kurang lebih 500 instruktur swasta untuk pelatihan metodologi sehingga mereka siap untuk mengajar di BLK. Untuk tahun 2019 ini kita memprogramkan kurang lebih 2000 instruktur swasta yang kita latih metodologinya sehingga secara perlahan-lahan nanti kurang kebutuhan instruktur ini akan terpenuhi.

Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati tadi benar sekali yang dikatakan pak Mafirion tadi bahwa saya diingatkan bahwa kedepan ini seluruh tenaga kerja di Indonesia harus dibekali dengan digital *skill*, karena dengan digital *skill* mereka akan mudah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan pekerjaan-pekerjaan yang baru.

Selanjutnya untuk jalan tol ini pak Julianus jalan tol, ini kami mau berkoordinasi dengan pihak jasa marga dari teman-teman yang tidak digunakan lagi ini akan kita latih. Yaitu kita seperti yang dikatakan pak Sekjen tadi punya program *reskilling* dimana satu sektor yang ditutup sehingga dia harus tetapi dia harus bekerja kita bekal

pelatihan-pelatihan untuk kemampuan yang baru agar mereka bisa bekerja di sektor-sektor yang masih ada pak. Ini kurang lebih ada kita mempunyai program untuk *reskilling*, *upskilling* dan *skilling*.

Selanjutnya pak Zulfikar, mohon maaf pak saya belum bisa menjawab sekarang tapi kalo nanti kami harapkan TA bapak bertemu dengan tim saya untuk mencari penyelesaian bagaimana masalah tanah yang belum bersertifikat ini. Sementara demikian bapak pimpinan, saya kembalikan lagi pada pak Sekjen silahkan. Terima kasih.

**SEKJEN KEMNAKER RI :**

Mungkin lanjut pada Dirjen Binapeta pak.

**PIMPINAN :**

Sebelum pak Maruli saya perpanjang dulu pak ya. Kalo rapat ini kalo nggak di perpanjang jadi bapak ngomong nggak masuk bagian dari rapat, ya nggak? Ya saya perpanjang 30 menit ya dari sekarang.

**(KETOK PALU 1X)**

**DIRJEN BINAPENTA DAN PKK KEMNAKER RI :**

**Baik terima kasih bapak pimpinan.**

Bapak, kepada bapak Imanuel dengan pak Mafirion mungkin ini terkait dengan SPSK minta ijin pak Imanuel ini memang bapak minta dipercepat kita memang sangat hati-hati pak karena ini memang sudah berapa tahun tertutup pengiriman penempatan ke Arab ini dan kami melihat memang ini suatu yang baik dimana di Arab sendiri terjadi perubahan di Indonesia juga perubahan. Jadi perubahan yang baik ini memang kita sangat hati-hati dalam pelaksanaannya. Menurut aturan memang undang-undangnya sudah ada disana kita juga punya undang-undang sebenarnya aturan dan infrastrukturnya sudah baik di negara sana dan disini tinggal memang dalam pelaksanaannya dan ini kita juga sangat hati-hati dan kemarin juga harusnya sudah sesudah MoU itu sudah dilakukan penempatan tetapi karena ada kasus mohon maaf Tuti Tursilawati yang Oktober itu kami sangat prihatin sehingga agak di *delay* sedikit

tetapi prosesnya tetap berjalan didalam mencari P3MI yang layak yang tadi dengan adanya satu tim lalu juga pelatihannya. Kami sangat hati-hati itu tapi kami akan segera pak melanjutkan. ‘

Untuk pak Mafirion ini terima kasih pak ini memang sosialisasi kita memang belum sepenuhnya tetapi memang didalam kita akan melakukan itu baik kami akan lakukan. Dan memang kembali lagi disini tidak ada satu perusahaan yang memonopoli pak dan mengasosiasi karena memang yang akan kita bina didalam ijin itu adalah PPTKIS, perusahaan penempatan beda dengan pelatihan dan khusus untuk pelatihan ini juga memang mungkin kepada bapak ibu sekalian juga kita memang sekarang ini juga bekerja sama dengan Binalanttas yang akan menetapkan kriteria-kriterianya dan juga khususnya untuk 2019 ini mungkin kita juga seperti yang kita ketahui didalam undang-undang 18 itu diperintahkan untuk memberikan apa memfasilitasi dan meskipun dananya kecil pak kita sudah alokasikan kurang lebih 10.000 pak yang untuk TKI. Ini awalnya dan ini sekarang kita bekerja sama untuk melihat BLKLN mana yang memang yang mampu karena kita ketahui sendiri BLK Pusat, BLKD daerah itu sudah nggak mampu jadi memang sedang dicari BLKLN-BLKLN yang memang yang bonafid dan baik.

Lalu yang kedua, kuota juga tidak ada memang waktu itu diminta kuota baik 10.000 ataupun 30.000 tetapi setelah kita sama-sama mendalami memang tidak ada kuota tetapi juga tergantung ini kalo memang kapasitas dari perusahaan dan pelatihannya mampu ya kenapa tidak besar, tetapi kalo tidak mampu yaudah. Nggak boleh besar-besar juga, jadi tidak karena kita sebutkan kuota nanti orang akan buru-buru mencukupinya atau berusaha untuk mencapai target tersebut. Oleh karena itu memang didalam pelaksanaan ini hati-hati terlihat dari kapasitas dan juga dengan kemampuan daripada perusahaan, jadi kuota itu bapak ibu sekalian tidak ada. Dan juga memang yang sangat baik disini adalah kalo saya bandingkan dulu dengan sekarang, kalo dulu mungkin janjinya memang ini perjanjian ya pak ya bu, kalo dulu mungkin pemerintah Arab itu yang misalnya mohon maaf yang ada dari umroh lalu disana dia mau kerja mereka akan fasilitasi. Lalu juga misalnya dia bekerja ke Suriah atau ke Jordan pindah ke Arab saudi mereka juga akan fasilitasi karena memang kebijakan mereka, mereka itu memerlukan tenaga kerja Indonesia. Dan *unprocedural* juga mungkin, tetapi dengan adanya perjanjian ini MoU kita namakan *technical arrangement* dia akan menutup dia berjanji yang dateng nanti melalui mohon maaf



umroh mereka nggak akan fasilitasi lagi, yang datengnya dari Suriah, Jordan mereka nggak akan fasilitasi lagi. Oleh karena itu disebut SPSK ini adalah satu *channel* hanya yang ditentukan oleh pemerintah yaitu pemerintah Indonesia nanti itu melalui Atnaker dan juga Kemnaker bekerja sama dengan *stake holder* yang lain. Lalu pak Handayani mohon ijin pak, ini memang kalo tadi bapak katakan terkait dengan, dengan intership sebenarnya memang ini kalo kita lihat kebetulan ya kalo kita lihat contoh shin hin suo begitu ya, itu sudah di sidak oleh Atnaker kita ya bu Indah disitu memang dari 175 itu bisa dilihat diviralnya mereka tidak mengalami kekerasan, tidak juga mengalami juga pemaksaan makan yang haram. Jadi yang disitu memang, yang disitu tidak tetapi mungkin dan yang lain-lain kemungkinan ada ini sedang kita *freeze* lalu kita lakukan tindakan dan ini nanti dalam beberapa hari ini nanti akan dipimpin oleh. Karena ini adalah perjanjiannya bukan perjanjian ketenagakerjaan tapi perjanjian dengan Kementerian Pendidikan jadi *leading* sektornya pak pemerintah dalam hal ini nanti adalah Kementerian Perdagangan, karena baru 2 jam yang lalu kita rapat juga dengan Kementerian Perdagangan bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Tenaga Kerja akan membuat tata kelola yang seperti tadi itu. Kita ketahui bapak ibu sekalian memang seharusnya mereka itu bekerjanya mendapatkan magang yang sesuai dan memang sudah sesuai antara universitasnya dengan perusahaan. Dan diizinkan memang 20 jam, tetapi tidak wajib 20 jam. Jadi kebanyakan orang Indonesia memanfaatkan yang tidak wajib itu juga mungkin kelihatan jadi kerja dan mohon maaf memang tadi yang kebanyakan yang mendapatkan fasilitas ini ya mungkin bapak ibu sekalian kurang mampu jadi karena ada kesempatan seperti itu mereka akan memanfaatkan itu keliatannya. Saya bisa membayangkan waktu kita sekolah juga mungkin bapak ibu sekalian atau pak pimpinan kalo sekolah di luar negeri itu juga bekerja di *book store* itu juga tetap juga mengangkat buku-buku seperti itu juga. Jadi memang kalo kita lihat kalo programnya sebenarnya sudah baik pak ini mungkin nanti kita lihat dalam pelaksanaannya begitu. Dan juga kembali saya lihat bahwa memang ini akan kita tindak lanjuti bersama-sama dengan kementerian pendidikan dan Dikti. Lalu kepada pak Marianus, ya ini pak tetap pak saja persyaratan ke luar negeri itu pak ya memang mesti layak kerja yaitu dengan kompetensi lalu juga dengan *fit*, sehat seperti itu. Kami juga memahami pak memang NTT itu sangat tinggi *trafficking* nya oleh karena itu kenapa dari sebagian besar desmigratif itu pak, sebagian besar kesitu pak. Memang kita ketahui juga jadi kita berupaya bukan hanya pencegahan dan prosedural tetapi dari awal sudah kita beri

tahu itu. Dan ini memang sangat bermanfaat teman-teman yang di desmigratif terutama yang memberikan informasi itu sekarang banyak di teror juga pak memang dengan calo-calo. Jadi memang mohon dukungannya pak di daerah dan kedua yang desmigratif lalu juga memang kita membentuk tim satgas ada di 21 kabupaten daerah termasuk juga di NTT. Kami juga sudah bertemu dengan wakil gubernur untuk menindak lanjuti bagaimana untuk mencegah *trafficking* yang ada di NTT, kami memberikan perhatian khusus pak memang ini menjadi apa target kita karena memang yang paling tinggi, tetapi mengenai kelayakan tetap pak itu persyaratannya. Memang kita ketahui juga banyak yang *unprocedural*, seperti itu. Oleh karena itu memang desmigratif kita dari misal ini saya kasih contoh dari 120, 20 nya saja itu sudah di NTT pak jadi terlihat adanya perhatian. Kepada pak Akbar ini TKA pak kita mengeluarkan kemarin adalah Kepres 20 lalu juga Permen 10 memang diduga itu akan meledak pak, memang itu akan menjadi ratusan ribu atau jutaan seperti itu. Data kami yang terakhir mohon ijin bapak mohon ijin kalo tahun lalu ada 86.000 per Desember 31 Desember 2017 pada tahun ini itu angka yang resmi adalah 95.000 jadi memang terjadi pelonjakan tetapi tidak seperti yang digembar-gemborkan dan kembali polanya sama pak. Dari dulu yang sudah pasti naik apa, China, Jepang, Korea, India, Malaysia, yang naik sekarang ya itu-itu juga jadi memang tren nya naik. Kemungkinan ini memang terkait dengan investasi jadi trennya dari dulu jaman kalo kita lihat 5 tahun, 10 tahun itu yang paling tinggi adalah China, Jepang, Korea, India, Malaysia dan jabatannya mohon ijin bapak itu memang adalah sebagian memang kita juga menengah ke atas saya kasih contoh disini hampir 80% adalah profesional, *adviser*, dan juga direksi. Seperti itu, jadi kalo memang kita lihat. Yang kedua, ini juga kebetulan ada pak Dirjen pengawasan kita juga membentuk satgas-satgas. Iya bener. Ada yang misalnya *unprosedural* kita melakukan tindakan dengan tegas pak. Kita dikasih tahu, kita langsung memeriksa, seperti itu. Jadi didalam aturan juga kita buat, didalam penindakan kita juga ada kita membentuk tim satgas TKA itu yang terdiri dari 3, 24 kementerian seperti itu pak. Kepada pak Zulfikar terima kasih pak ini kita ada program-program dakwah itu selalu ada itu ya. Dan memang kita kirim ke daerah-daerah yang memang agak kritis seperti itu, bukan hanya dakwah tapi juga seni kita kombinasikan.

**DIRJEN BINAPENTA DAN PKK KEMNAKER RI :**

Terus dan anggaran tahun 2019 juga kita prioritaskan terutama juga ke bukan hanya ke Hongkong juga ke Taiwan dan tempat-tempat lain. Terima kasih pak untuk padat karya saya rasa itu program yang sangat baik untuk perluasan kesempatan kerja dan kami mohon dukungannya dan kami juga mohon kerja sama dengan bapak ibu sekalian. Terima kasih pak.

**FP-HANURA (JALALUDDIN AKBAR R, S.H) :**

Begini pimpinan sidang,

**PIMPINAN :**

Iya silahkan pak.

**FP-HANURA (JALALUDDIN AKBAR R, S.H) :**

Jadi mungkin ada yang terlampaui ini pak, sebenarnya juga ini yang tadi saya tanyakan terkait dengan pekerja-pekerja yang cukup banyak di suatu perusahaan, yang tadi yang saya sebutkan mereka dipaksa. Dipaksa dalam artian tunduk kepada peraturan internal perusahaan dalam bentuk bekerja sekian bulan harus mundur, sekian harus mundur. Ini, ini banyak sekali yang terjadi dan ini sangat meresahkan dan tidak memberikan kepastian hukum kepada para pekerja. Kemudian ijin juga pak Sekjen beserta jajaran, pimpinan sidang, ada beberapa juga saya temukan orang-orang asing. Ya nda papa saya sebutkan dari RRC, mereka ini khususnya di wilayah kami di kota Makassar ini buat toko, menjual mereka, menjual. Dan tidak bisa sama sekali bahasa Indonesia, dan dia langsung menangani dengan *customer*. Makanya bingung mereka komunikasinya, jadi mohon barangkali jajaran pak menteri, pak sekjen, untuk lebih intens mengawasi yang seperti ini. Karena jujur kemarin saya sempat dari seputaran kena toko yang mereka jual ini kan ada gang masuk penduduk asli di didalam situ, mereka sempat tanya kepada saya. Pak mau di apain ini pak ini orang ini dibuka ini? Kok juga artinya mereka tidak bisa beradaptasi dengan budaya lokal, seperti itu. Itu barangkali pimpinan sidang, terima kasih banyak.

**PIMPINAN :**

Iya, sebentar bu ya. Ada lagi nggak yang mau dijawab selain dari yang ini? Sudah ya semua ya? Pertanyaan-pertanyaan yang tadi? Selain yang baru tadi ini pak. Maksudnya supaya selesai dulu ini, ini nanti permen baru ini yang baru nggak? Bapak baru gak? Pertanyaan baru? Oh iya silakan dulu biar nanti setelah ini bu ya? Sebentar ya bu. Iya silakan, dijelaskan ini kan di interupsi ini nah itu bisa dijelaskan. Silakan.

**DIRJEN BINALATTAS KEMNAKER RI:**

Pak Akbar, kami juga tidak menutup mata pak. Kemungkinan ada yang *unprosedural*. Tetapi yang saya catat tadi adalah bahwa itu adalah yang resmi. Dan ijinnya adalah ijin sponsor, dan kami tidak pernah memberikan ijin untuk orang berdagang sendiri, jualan, seperti itu nggak. Kali itu ada ya nanti, tadi barusan saya sedikit bisik-bisik dengan pak Dirjen pengawasan itu langsung akan ini barusan beliau langsung WA mungkin dengan pengawas ketenagakerjaan yang ada disana. Tapi kembali lagi pak bahwa kita tidak pernah memberikan ijin untuk yang rendah, kedua tidak ada CV exploit, jadi datanglah ke Indonesia bisa berdagang, itu tidak. Pada prinsipnya adalah *sponsorship*, jadi perusahaan. Kita memulangkan melalui sponsor, kita mereka mendatangkan melalui sponsor. Demikian pak.

**PIMPINAN :**

Baik, sudah cukup ya? Ada lagi? Oya silakan.

**FP-HANURA (JALALUDDIN AKBAR R, S.H) :**

Masih ada yang kurang pimpinan. Yang menyangkut masalah ini tadi yang dibuat seolah-olah harus mundur pada jam-jam waktu-waktu tertentu itu. Ini belum dijawab ini.

**DIRJEN PHI DAN JSK KEMNAKER RI :**

**Baik terimakasih yang kami hormati pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat. Bapak ibu sekalian.**

Pertama kami menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh pak Jalaluddin terkait mengenai status-status hubungan kerja pak. Jadi nanti mohon kami juga diberikan detailnya karena sampai saat ini memang untuk carrefour kami belum ada laporan detail tentang itu. Yang penting adalah sebenarnya kerja antara, hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerjanya ini diikat dengan kontrak kerja, jadi sebagai bukti nanti pak kontrak kerja ini disitu tertera memang sampai sejauh mana. Adapun kondisi-kondisi yang diasumsikan bahwa pengusaha membuat satu kontrak yang akhirnya dicoba, akhirnya mengundurkan diri, dan lain sebagainya ini nanti bisa tertera pak di kontraknya ya. Jadi ada status, misalnya status PKWT jadi perjanjian kerja tertentu dan tidak tertentu nah inilah nanti yang bisa dilihat di kontrak kerja. Jadi nanti mohon pak jika ada memang detail tolong sampaikan kepada kami, dan nanti kami juga akan mengkoordinasikan pada dinas tenaga kerja dimana memang status-status hubungan kerja yang menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu ini nanti didaftarkan pak di dinas tenaga kerja yang bersangkutan. Itu yang pertama, kalo boleh kami langsung menjawab yang lain bisa pak sekjen? Tentang Undang-Undang 13 tadi karena ada pertanyaan dari pak Imanuel ini mengenai bagaimana menyikapi dengan PP-PP sebagai mandat dari Undang-Undang 13 yang belum ada sampai saat ini. Ada 3 memang yaitu PP mengenai pesangon karena ini sebenarnya sudah dibahas dan sudah disusun *draft* nya, namun dalam masa pembahasan tersebut ada penolakan dari serikat pekerja karena.

Penyusunan kembali tentang uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Jadi itu mandat dari pasal 156 ayat 2. Nah oleh karena itu begitu pembahasan sudah terjadi dan muncul undang-undang baru yaitu undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional mana didalamnya juga memuat tentang uang pensiun maka perlu ada harmonisasi terkait hal tersebut. Dan tentu kami nanti didalam *mereview* Undang-Undang 13 memasukan juga pemikiran-pemikiran tentang ini, sepanjang Undang-Undang 13 belum direvisi tentu tidak bisa ada harmonisasi dengan undang-undang sistem jaminan nasional. Nah yang kedua mengenai PP penumbuh kembangan koperasi. PP mengenai penumbuh kembangan koperasi ini juga sudah kita lakukan FGD dan bersama *stake holder* terkait dan juga sudah dibahas di sekretariat negara, akan tetapi substansi yang dibahas waktu itu dan disepakati ini tidak jauh berbeda dengan undang-undang perkoperasian. Yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2012, maka waktu itu disarankan tetap mengacu pada undang-

undang perkoperasian artinya PP penumbuh kembangan koperasi memang dikembalikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Yang ketiga tentang PP fasilitas kerja, memang ini menyangkut kemampuan dari perusahaan sehingga perusahaan kecil tidak bisa untuk membuat fasilitas kerja ini menjadi wajib, sedangkan perusahaan-perusahaan menengah dan besar ini sudah banyak yang membuat fasilitas-fasilitas kerja. Oleh karena itu upaya Kemnaker terhadap 3 PP yang belum ada sampai saat ini adalah pertama tentang fasilitas kesejahteraan pekerja, ini didorong dimuat dalam perjanjian kerja bersama. Jadi ketika berunding dari kedua belah pihak maka didorong agar fasilitas-fasilitas itu bisa dirundingkan dan diadakan. Sedangkan penumbuh kembangan koperasi ini mengacu kepada undang-undang perkoperasian. Untuk pesangon ini kami membahas di internal adalah mengharmonisasi dengan irisan untuk undang-undang sistem jaminan sosial nasional. Nah pada kesempatan nanti jika ada pembahasan-pembahasan untuk merevisi undang-undang ini tentu ini sangat *in line*, sangat bagus sekali. Nah terkait tadi mengenai awak mobil tangki Pertamina dimana tadi ada harapan untuk diselesaikan tidak secara hukum, terus terang dalam hal ini bapak Menteri Ketenagakerjaan di penghujung tahun 2016, 2017, ini sudah memfasilitasi langsung pertemuan ini dan mengundang dirutnya, jajarannya PPN, PT. PPN Pertamina Petra Niaga dan kami juga turun langsung bersama pengawas Ketenagakerjaan tentu bersama pak Dirjen dan jajaran. Nah intinya memang sudah lama dan waktu itu sudah disepakati bahwa itu diselesaikan secara musyawarah, namun dalam perjalanannya ada 2 kasus memang. Pertama tentang status hubungan kerjanya yang sudah keluar nota pengawasan dan yang kedua adalah penetapan perhitungan kekurangan upah lembur, ini juga sudah keluar penetapannya akan tetapi dalam perjalanannya ternyata perusahaan menggugat atau membanding dan sudah turun memang. Kami juga kemarin berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan dan dinas Jakarta Utara, artinya PTUN sudah mengeluarkan putusan dan memang adalah jalur-jalur hukum yang nanti kami akan mencoba tentu berkoordinasi dengan Dirjen pengawasan dan Dinas tenaga kerja Jakarta Utara untuk bagaimana bisa memfasilitasi musyawarah di antara keduanya. Sekalipun proses hukum ini sedang berjalan, kemungkinan hal itu tentu masih bisa dibicarakan. Tapi intinya adalah upaya-upaya Kemnaker untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih ini dengan jalur musyawarah itu selalu kami kedepankan, terutama untuk AMT ini langsung dibawah oleh, dibawah langsung oleh

pak Menteri ketika itu dan kami dan jajaran terus berkoordinasi. Mungkin 3 hal itu yang bisa kami sampaikan, sekali lagi terima kasih. Makasih pak Sekjen.

**SEKJEN KEMENAKER RI :**

Terima kasih bu Dirjen. Mohon izin pimpinan mungkin ada tambahan dari Dirjen pengawas.

**DIRJEN BINWASNAKER KEMNAKER RI :**

**Terima kasih pak Sekjen.**

**Yang kami hormati bapak ibu pimpinan dan bapak ibu Anggota Komisi IX.**

Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja jawaban dari pak Marli dan bu Hayani terkait pertanyaan pak Jalaludin Akbar tadi yang disampaikan bahwa isu mobilisasi tenaga kerja asing di Indonesia yang tidak terkendali pak. Jadi saya tidak bisa mengingkari bahwa fakta ini memang ada, saya boleh cerita kalo yang terakhir tanggal 20 bulan yang lalu belu 1 bulan dari sekarang saya menurunkan tim ke Bangka, jadi tenaga kerja ini bekerja di kapal pak. Sampai disana pengawas kami dari kementerian menyampaikan kepada saya bahwa ini adanya di tengah laut pak tenaga kerja asing ini. Kebetulan yang saya tugasi ini juga direktur bina penegakan hukum polisi jadi saya sampaikan ya sudah tidak punya fasilitas pak ke tengah laut itu. Sehingga koordinasi dengan Polda pinjem pol air, kapalnya pol air, sehingga bisa dijangkau lah sasaran dan ternyata benar disana ada tenaga kerja asing yang ilegal. Ada 14 orang saat itu, ini hanya contoh kasus saja tapi sebenarnya di kasus-kasus lain kami juga masih menemukan ya. Saya sendiri juga turun ke Jawa tengah waktu itu di PLTU di Jepara juga saya menemukan di beberapa kasus, sehingga terima kasih pak Jalaludin atas informasinya dan saya sangat menghargai kalo informasinya itu akurat. Kalo di Makassar misalnya tempatnya dimana, jalan apa dan sebagainya. Saya juga punya pengawas disana pak, di Makassar pak. Nanti kalo kurang kuat kami turunkan tim dari pusat juga sehingga poinnya adalah upaya Kementerian sebenarnya sudah maksimal pak, tetapi ini bukan keluhan begitu pak. Sarana pengawas kami di lapangan sangat kurang, bahkan saya tanya kepada pengawas itu punya nggak mobil patroli untuk inspeksi ke pabrik-pabrik itu? Mereka tidak punya pak, pakai sepeda motor itu motor sendiri. Jadi memang antara tantangan dengan kondisi *real* yang kami miliki memang saya merasa agak kurang sebanding ini kalo bicara kekuatan begitu

ini berat ini. Inilah kondisi *real* nya tidak bermaksud untuk mengeluh tetapi ini lho faktanya begitu. Saya kira begitu pak pimpinan, terima kasih.

**PIMPINAN :**

Jangan sampai diduga nanti pemerintah sengaja buat begitu supaya malah marak TKA nya. Nah ini versi sebelah maksudnya. Engga pak betul pak kalo keluhannya begitu kan bukan ngeluh tapi tetap ngeluh juga jadi bagaimana ceritanya. nggak ibu Sumarjati masih mau bicara ini, gantian pak. Ya kan? Silahkan bu.

**FP-GERINDRA (Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.K.M) :**

Terima kasih.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.***

**Yang kami hormati pimpinan Komisi IX dan rekan-rekan sekalian.**

**Bapak dari jajaran Kementerian Tenaga kerja yang kami hormati.**

Saya disini juga baru pak sudah 3 bulan tapi kebetulan dengan Kemenaker baru sekarang. Kami ingin menyoroti soal ini pak, dampak Ketenagakerjaan terkait industri revolusion *four zero* ini kan disini masih pertanyaan semua. Perubahan pekerjaan dan ketrampilan, perubahan pola kerja dan sebagainya, kalo secara maksud saya, saya orang awam ya kalo dengan IT mungkin lapangan kerja banyak tapi tenaga kerjanya sedikit. Kita lihat saja kalo tol-tol itu kan PHK berapa banyak tenaga kerja yang kerja di, padahal kita banyak pengangguran kalo kita lihat selanjutnya ya. Kemudian ini didalam *policy* itu ada *skilling*, *upskilling* dan *reskilling*. Dimana implementasinya BLK, LPKS, industri komunitas dan LSP peningkatan mutu. Tapi peningkatan aksesnya tidak ada persyaratan umur, pendidikan, pengalaman, saya kira tetap ada harus ada pendidikannya harus apa supaya bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan revolusi industri ini. Kemudian 1,4 juta orang, oke.

Yang selanjutnya, pelatihan vokasi ini juga disampaikan berapa tenaga kerja yang baru, pengangguran dan lain-lain, dimana semuanya ini mengutamakan BLK untuk peningkatan ketrampilan dan lain-lain. Bahkan ini kan ada *mismatch* itu juga beberapa provinsi seperti Jawa Timur itu misalnya meningkatkan SMK daripada SMA, oke. Tetapi dari BLK yang kami liat pak BLK itu dari segi fisik maupun kualitas SDM nya itu jauh dari pada yang disampaikan bapak-bapak tadi. Masih sangat-sangat



kurang, bahkan belum lama ini saya dengan bu Ermalina juga ya. Tempatnya luas sekali, pemanfaatannya sedikit apalagi kena bencana tetapi kalo kita lihat juga dari segi kualitas personilnya, apalagi *trainer* dan lain-lain itu memang sangat memprihatinkan. Bagaimana kita bisa mendidik segitu banyaknya diharapkan untuk menjadikan, mendapatkan, produksi tenaga kerja yang berkualitas yang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Apalagi ini juga ya untuk Undang-Undang 13 tahun 2003 Perpres belum ada untuk lembaga koordinasi pelatihan kerja nasional, itu sudah 15 tahun belum ada Perpres tentang lembaga koordinasi pelatihan kerja nasional yang tentunya ini sangat-sangat diperlukan. Kalo memang dari tenaga, dari Kementerian tenaga kerja sendiri tadi kan akan merekrut yang dari swasta, kalo swasta itu apakah juga tentang upah atau gaji dan sebagainya bagaimana? Kalo yang profesional kalo yang dari swasta itu mahal sekali. Kebetulan saya pernah juga di Diklat di Depkes itu juga memang banyak masalah, tetapi kita memang banyak teori tetapi kita memang banyak teori tetapi nanti pelaksanaannya kadang-kadang jauh, apalagi melihat kualitas BLK-BLK yang ada. Sudah pernah banyak terbengkalai kan BLK ini. Kemudian kalo tadi masih bicara soal dengan Saudi, Taiwan dan sebagainya ada mahasiswa dan sebagainya seberapa jauh sih sebetulnya kemudian kita mengalihkan tenaga kerja itu ke arah yang profesional. Seperti perawat kan sudah di perluas sampai Korea Selatan, Jepang dan lain-lain. Seberapa banyak penyerapannya dan lain-lain. Karena jangan sampai tenaga kerja kita ke luar negeri banyak tetapi kita juga banyak dimasukkan tenaga kerja asing tadi bapak akui yang tidak terdeteksi. Setiap kali dari masyarakat atau DPR menanyakan jumlah tenaga kerja asing khususnya Cina itu selalu dibantah, jumlahnya tidak sebanyak yang disampaikan. Tetapi kan banyak sekali yang tidak terdeteksi pak, tadi dari pengawasan sangat keterbatasan, tetapi kan masyarakat bisa melaporkan langsung ke pengawas daerah itu kalo pengawas daerah itu memang dekat dengan masyarakat. Sehingga bisa di ambil tindakan, jangan sampai hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat ataupun melalui medsos itu benar-benar terjadi kita bisa mengalami seperti negara-negara yang utang besar ke Cina. Utang kita ke Cina sudah besar sekali, bahkan tadi saya belum disini waktu itu sudah pada ke Maruwali katanya tenaga kerja asingnya sedikit , tetapi laporan dari masyarakat setempat pun banyak sekali. Hal ini mungkin kita perlu di waspadai dan saya khususnya terutama tentang ini hal-hal yang dilakukan terutama tentang pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas apalagi melalui yang BLK dan lain-lainnya itu

apakah ini akan benar-benar bisa dicapai atau hanya harapan saja? Kalau melihat kondisi BLK seperti juga disampaikan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih.

**Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

**PIMPINAN :**

Silakan pak langsung pak. Atau begini deh ini sebelum supaya langsung sekalian, untuk Dirjen PHI itu ada pengaduan ke DPR Komisi IX terkait dengan masalah sengketa perusahaan dengan pekerja di Bekasi, apa namanya jaringannya? Jaringan PPM ya? Yang kemarin diterima itu, ya pak Handayani ya? Jaringan PPML. Katanya kata pekerjanya itu perusahaannya tidak mau mengikuti keputusan dari pihak pekerja dan juga pemerintah, jadi artinya kalo nggak salah begitu ya? Jadi pemerintah tidak berhasil meyakinkan atau memaksa dalam tanda petik pihak perusahaan untuk melaksanakan atau mengeksekusi kewajiban mereka pada pekerja itu. Mungkin ibu sudah tahu tapi saya tidak tahu kalo begitu modelnya kan nggak ada gunanya. Kewibawaan dari Kementerian Ketenagakerjaan ini bagaimana? Tadi belum lagi pengawas bilang kita kurang pengawasan, tapi ini kan sudah jelas ada orangnya sudah datang. Nggak bisa di selesaikan. Jadi mohon diberikan penjelasan kepada kita supaya kita juga punya jawaban kepada mereka kalo dateng kesini sudah 3 kali mereka datang kesini. Jadi mohon pak dijawab sekalian itu. Terima kasih.

**DIRJEN BINALATTAS KEMNAKER RI :**

Oke terima kasih bu, ini masalah pelatihan. Jadi perlu kami laporkan disini, memang tidak semua BLK kondisinya yang sama. Jadi kita sekarang ini di seluruh Indonesia memiliki 303 BLK, kepemilikannya pun ada 3 bu. Pemerintah pusat dalam hal ini Kemnaker ada 19 BLK, provinsi dan juga kabupaten kota. Nah ini kondisi yang ada itu ini baru sekarang kurang lebih 1/3 BLK itu kondisinya baik, 1/3 sedang, 1/3 buruk. Dan ini kita sudah upayakan program revitalisasi BLK tetapi sampai sekarang belum sampai semuanya terevitaliasasi karena semuanya juga terbentur pada alokasi anggaran yang ada pada kami bu. Kalo yang di (suara tidak jelas) dua tahun terakhir ini anggaran kita agak lumayan sehingga kita bisa agak membantu BLK-BLK didaerah. Sebenarnya pemerintah daerah ini terus terang bu kurang mengalokasikan anggaran untuk BLK, sehingga mereka semuanya banyak yang tergantung oleh

pemerintah pusat. Jadi bukan hanya dari sisi untuk pelatihan tapi juga untuk peralatan dan juga untuk instruktur bu, instruktur seperti yang tadi sudah dikatakan sudah banyak yang pensiun tetapi apabila kita mengajukan formasi tambahan instruktur itu selalu yang turun itu hanya sepersekiannya sehingga makin lama instruktur ini semakin berkurang seperti yang saya laporkan tadi bahwa untuk saat ini *real* nya kita kekurangan 5000 instruktur. Tetapi kita menggandeng dari industri dan teman-teman LPK yang bisa melatih kita ajak untuk melatih di BLK agar kekurangan instruktur ini bisa tercukupi. Sampai saat ini kapasitas pelatihan yang akan kita lakukan untuk tahun 2019 kurang lebih 215.000 ini sudah kita susun dengan teman-teman BLK semua dan ini akan kita laksanakan jadi bukan hanya harapan akan kita laksanakan dan pelatihannya juga berdasarkan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja karena ketika kita mengikuti program pelatihan itu adalah bersama-sama dengan teman-teman dari industri, teman-teman dari Kadin begitu bu. Terima kasih.

#### **DIRJEN PHI DAN JSK KEMNAKER RI :**

Terima kasih pak Sekjen. Mungkin pimpinan kalo boleh kami diberikan informasi detailnya karena di Bekasi itu di perusahaan mana di kabupaten atau kota dan salapa. Karena jika penanganan hubungan industrial itu memang produk dari mediator memang tidak bisa di eksekusi oleh mediator, itu tergantung kepada pihak-pihak. Tetapi jika itu memang nota pengawasan nah ini memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa di eksekusi, dimintakan pandangan dari pengadilan atau Mahkamah Agung terhadap status hubungan kerja sebagai mana salah satu kasus dari awak mobil tangki Pertamina demikian pak pimpinan yaitu satu yang memang tidak bisa di eksekusi. Yang dinas memintakan petunjuk dari Mahkamah Agung, karena nota memang tidak bisa kecuali memang putusan hakim yang bisa ada upaya bandingnya. Ijin pak nanti kalo kami.

#### **PIMPINAN :**

Nama perusahaannya PT. Primatama Bajatama yang mengadu kesini itu adalah persaudaraan pekerja muslim Indonesia ya? Itu jelas bu, PT. Primatama Bajatama, kabupaten atau kota tadi tu? Kota Bekasi bu. Itu kan beda kabupaten sama kota ya. Nanti tolong ditolak bu jadi ini supaya jelas jangan sampai ada orang-orang

yang masyarakat kita yang merasa di marginalkan hak-hak nya sebagai pekerja karena kekurangan awasan kita kepada mereka jadi mungkin pemerintah belum tahu tapi katanya sih Disnaker sudah mengeluarkan pendapat dan perintah pada perusahaannya tapi perusahaannya tidak peduli. Kalo nggak peduli tu yang ngurus negeri ini siapa, pengusaha atau pemerintah? Begitu, jadi ini penting kita nanti minta tolong ya supaya di kerjakan. Ada hal lain nggak? Cukup ya? Kalo tidak ada langsung saya mau bacakan isi pengharapannya supaya pak Maruli senang. Ya nggak? Ada lagi cukup ya? Coba ditayangkan dulu *draft* kesimpulan rapatnya.

Oke ini dia pak, sudah bisa dibaca belum? Belum ya? Kok cuman satu depan? Ah ini sudah. Baik saya bacakan dari atas ini, *draft* kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI dengan Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan, Dirjen Binalanttas, Kemenaker RI, Dirjen Binapenta, dan PPK Kemenaker RI, Dirjen PHI dan JKS Menaker RI, dan Rektur Jendral Binwasnaker dan K3 Kemenaker Republik Indonesia, Senin tanggal 14 Januari 2019.

Kesimpulan yang,

1. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan perhatian dalam rangka mempercepat realisasi program BLK komunitas pada tahun 2019 sesuai kebutuhan daerah yang telah diusulkan sebelumnya.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk meningkatkan sosialisasi penempatan pekerja migran Indonesia melalui *one channel, one channel model*. Sehingga dapat diterima secara luas termasuk untuk menghindari isu praktik monopoli oleh pemangku kepentingan. Baik swasta maupun pemerintah.
3. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan revitalisasi BLK dengan melibatkan *stake holder* lainnya yang saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga dapat memberikan peningkatan keahlian pekerja di masa yang akan datang.
4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan sosialisasi program magang melalui kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dan perguruan tinggi di Taiwan dibawah koordinasi Kementerian Ristekdikti.

Nomor 4? Nanti bapak tanggapi, sebentar dulu ini anggota dulu pak, ya nggak? Silakan anggota ada nggak? Yang mau menanggapi. Tapi perlu saya sampaikan ke pak Satrio ini saya sudah telepon ke pesantren ya, itu tim survei bapak itu salah total pak. Itu pesantren masih punya 2 hektar pak tanah, ini dikirim foto sama saya. Orang yang survei pun dikirimkan kepada saya datang ini pak ada fotonya. Salah itu makanya ini sebelum menanggapi maksud saya yang lain pak. Jadi informasinya nggak betul ini, jangan-jangan mau menghindari supaya pesantren itu dapat lalu dia bilang begini-begini. Ya kan? kalo perlu pak Satrio harus turun kesana memeriksa itu betul apa tidak. La iya saya ikut, supaya kita tertibkan juga ini apa surveyer-surveyer ini. Ini survei-survei banyak yang sudah nggak bener pak, ada yang partai-partai saja di survei salah semua. 1,7%, 2,8%, iya nggak? Sudah banyak yang salah apalagi survei yang beginian pak ada duitnya, iya nggak? Itu nggak betul. Masa PPP dikasih 1,8% masuk akal nggak? Kan ndak masuk akal. Iya. Makanya kita harus tertibkan survei-survei, nanti nyatanya ternyata 7,9%. Ngga ini pak Satrio disini si bukan main-main ya, ini amal jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini ditunjukkan fotonya masyarakat jadi kasihan juga pesantrennya dibidang nggak punya tanah. Merembet ke pilpres dan pileg ini yang jadi susah kan kita ini urusannya BLK bukan urusannya pileg pilpres. Jadi merembet nanti kemana-mana. Ada tanggapan nggak, sudah bener ini? Baru kalo sudah nggak ada lagi kita kasih kesempatan pada atau ada yang mau nambahkan. Silahkan pak Irgan ada yang mau ditambahkan disini nggak? Sudah cukup? Sebentar pak Marinus ini sudah kembali ke laptop. Bagaimana?

**FP-GERINDRA (Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.K.M) :**

Dalam merealisasi BLK apakah juga, memang revitalisasi itu macem-macem tapi mohon dapat dimasukkan juga peningkatan kualitas instruktur. Peningkatan, ini kan revitalis IPLK dan peningkatan kualitas pelatihannya itu mohon dimasukkan.

**PIMPINAN :**

Iya silakan ditambahkan. Meningkatkan revitalisasi BLK dan peningkatan

**FP-GERINDRA (Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.K.M) :**

Termasuk meningkatkan instruktur dan kualitas pelatihan. Karena kalau kualitas pelatihan tidak bagus ya nggak bisa juga lah. Mohon maaf ya kalo waktu kita lihat itu bener-bener memprihatinkan sekali.

**PIMPINAN :**

Sudah? Cukup ya? Ada yang lain nggak? Ibu Kartika ada yang mau ditambahkan? Nggak soalnya bu Ermalea yang dulu saya tanyakan dulu bu Kartika ada nah ternyata nggak ada masukan. Silakan pemerintah.

**PIMPINAN :**

Jalaluddin mau bicara?

**FP-HANURA (JALALUDDIN AKBAR R, S.H) :**

Mau ditambahkan pimpinan.

**PIMPINAN :**

Mau ditambahkan yang mana itu?

**FP-HANURA (JALALUDDIN AKBAR R, S.H) :**

Tenaga maksudnya tenaga instruktur.

**PIMPINAN :**

Nomor berapa dulu pak?

**FP-HANURA (JALALUDDIN AKBAR R, S.H) :**

Nomor 3.

**PIMPINAN :**

Nomor 3. Oh ya termasuk tenaga instruktur. Kalo instruktur tu nggak ada tenaganya ya? Harus pakai tenaga supaya punya tenaga begitu. Kalo instruktur saja kan nggak ada tenaganya berarti. Nggak papa bagus, termasuk tenaga instruktur cocok. Macam disekolah, tenaga guru ya kan. Silakan pak, monggoh pak.

**FP-HANURA (JALALUDDIN AKBAR R, S.H) :**

Terima kasih bapak pimpinan.

Terkait dengan *draft* kesimpulan RDP kali ini mohon ijin bapak setelah masukan dari bapak dan ibu Dirjen nomor 4 mungkin karena ini tugas fungsinya Kementerian Ketenagakerjaan, apa maaf Kementerian Ristekdikti pak pimpinan jadi mohon ijin bagaimana kalo ini memang tidak dimasukkan dalam Rapat Dengar Pendapat kita. Karena yang dimaksud di magang dalam kaitan magang di Taiwan itu terkait dengan program pendidikan Diktinya, kerja sama antara lembaga pendidikan Dikti antara Indonesia dengan Taiwan.

**PIMPINAN :**

Yang ribut kemarin ini ya? Yang university to university itu? Itu yang ribut ya?

**FP-HANURA (JALALUDDIN AKBAR R, S.H) :**

Betul pak.

**PIMPINAN :**

Kalau Atase Ketenagakerjaan, oh nggak ada pula disitu Atase itu ya. Jadi peranan Kemenaker.

**SEKJEN MENAKER RI :**

Kalo di Taiwan ada Atase Ketenagakerjaan ada di kantor KDI ya pak ya. Kamar Dagang Indonesia pak.

**FP-GOLKAR Ir. ICHSAN FIRDAUS (WAKIL KETUA) :**

Pak Sekjen kalo ada konflik seperti itu peran Kementerian Ketenagakerjaan itu apa pak? Ini misalnya ada konflik ada pekerja paksa dalam tanda kutip ya, isu pekerja pak itu apa peran Kementerian Ketenagakerjaan?

**SEKJEN KEMENAKER RI :**

Yang dilakukan kemarin oleh Kementerian Ketenagakerjaan via Dirjen Binapenta adalah mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengawasi juga di lapangan terkait dengan di industrinya pak. Jadi sudah ada komunikasi antara KDI Indonesia dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan dan ditingkat pusat juga sudah ada koordinasi antara Ristekdikti dan Kemenaker pak, pak Dirjen. Dengan perdagangan, dengan Dirjen Perdagangan, Kementerian Perdagangan maaf.

**FP-GOLKAR Ir. ICHSAN FIRDAUS (WAKIL KETUA) :**

Sebenarnya poin 4 kan kita minta agar kemudian tenaga kerjanya itu punya peran bagaimana mengawasi proses program magang ini sehingga tidak muncul isu kerja paksa yang sampai harus berjam-jam, yang katanya isunya harus makan daging yang tidak halal begitu. Karena kan kita minta di poin 4 seperti itu tapi apa ininya? Artinya kita pingin bukan hanya sekedar program magang, ini kan ada isu yang kita harus selesaikan begitu pak Sekjen. Tadi kan pak sekjen bilang kita juga koordinasi dengan Dirjen Dikti dan sebagainya begitu, nah poin itu sebenarnya yang ingin kita dapat. Sehingga kemudian tidak ada lagi isu itu begitu. Bukan isu tapi tidak terjadi lah hal-hal seperti itu. Kira-kira apa tu pak, pak Sekjen?

**SEKJEN KEMENAKER RI :**

Mohon ijin pak pimpinan. Kami hanya ingin mencoba mendudukan secara proporsional. Program magang ini memang berkembang dalam konsep vokasi itu ada di program, ada di pelatihan dan pendidikan. Baik itu pendidikan menengah maupun itu pendidikan tinggi, karena ini konsep vokasi. Nah yang masyarakat umum lihat karena terkait dengan magang seolah-olah itu jadi menjadi domainnya Kementerian Ketenagakerjaan, padahal engga, padahal Kementerian Ketenagakerjaan dalam



koteks magang itu magang dalam rangka pelatihan nah kebetulan di Taiwan yang terjadi kemarin adalah magang dalam program pendidikan formalnya perguruan tinggi pak.

**F-PKB (H. HANDAYANI, SKM) :**

Pimpinan interupsi pimpinan, kanan Handayani.

**PIMPINAN :**

Iya silahkan.

**F-PKB (H. HANDAYANI, SKM) :**

Terima kasih pimpinan. Begini pak, yang setahu saya yang saya sudah dikontak orangnya ya jadi mereka ke Taiwan itu sebenarnya mereka mau bekerja pak. Kuliah itu cuma sambilannya itu yang jadi sasarannya mereka di Taiwan itu sekarang pak. Magang kuliah itu itu sasarannya itu mereka masuk kesitu dia bekerja tadi sambilannya kuliah. Bukan kuliahnya yang dipatokkan pertama enggak. Yang saya lihat disini, makanya mereka itu bayar, mereka tidak gratis. Mereka itu bayar sampai 35 juta tapi untuk awal bisa bayar 7 juta nanti di bayar dikurangi dari gaji mereka di perusahaan tempat mereka bekerja itu pak. Makanya saya sampaikan tadi tanggal 19 saya diundang, diundang untuk ikut interviu kegiatan dari rektornya mungkin kalo memang dari Kementerian Ketenagakerjaan mau hadir nanti ya saya anggap kita sama-sama kesitu kita denger betul tapi saya yang jelas dia bahasanya bahasa Cina pasti pak. Taiwan kan. mungkin demikian terima kasih.

**PIMPINAN :**

Jadi begini pak Handayani, dijelaskan oleh pemerintah barusan ini ini program adalah apa namanya universitas ke universitas, universitas kita dengan universitas mereka Kemenaker ngga ikut. Kalau misalnya mereka bertujuan niat intensi dia berangkat kesana untuk bekerja itu kan gabisa dicek juga. Kan nggak bisa dicek kamu niatnya untuk bersekolah atau bekerja kan? nggak tahu juga yang penting yang ada adalah didalam dokumen yang tertulis itu mereka belajar magang istilahnya disananya, persoalan niat dia cari uang nggak bisa kita prediksi nggak bisa juga kita

misalnya tahu apa yang mereka inginkan. Maka Kementerian Ketenagakerjaan minta supaya kesimpulan ke 4 ini jangan masukin kesini, masukin ke Komisi X kurang lebih begitu.

**F-PKB (H. HANDAYANI, SKM) :**

Iya keinginan orang mana yang tahu ya. Tapi sekarang kita kan mau melindungi warga negara Indonesia yang ada di daerah orang di luar negeri itu. Jadi kita jangan melihat bahwa niat itu apa, bagaimana, sedangkan sekarang kan sudah heboh pimpinan. Sudah heboh mereka di kerja paksa situ, dan mungkin saudara-saudara lain dari Kementerian Ketenagakerjaan harus mewaspadai ini semua atau melakukan pengawasan ditempat mereka bekerja. Tidak bisa lepas tangan dari Kementerian Ketenagakerjaan, mereka itu sudah tahu dia itu matang kerja, ada ujung kerjanya. Kalo mereka memang disitu kuliah betul ya itu nggak masalah, ini tidak. Jadi kerjanya itu pimpinan yang harus kita awasi. Terima kasih pimpinan.

**PIMPINAN :**

Iya saya paham itu sebetulnya, Cuma ini bagaimana? nah pemerintah setuju nggak di masukin seperti ini?

Ah bisa diganti silahkan.

**DIRJEN BINALATTAS KEMNAKER RI:**

Mohon maaf pimpinan.

**PIMPINAN :**

Iya silakan.

**DIRJEN BINALATTAS KEMNAKER RI:**

Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Ristekdikti dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemagangan.

**PIMPINAN :**

Iya bagus, bagus. Iya itu saja. Coba tulis dulu, untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Ristek dan Dikti dalam rangka pengawasan pelaksanaan program pemagangan perguruan tinggi. Antar perguruan tinggi. Kok kepengawasan sih? Memang bisa pengawasan pakai awalan ke? Ah supaya sama antar perguruan tinggi Indonesia dan Taiwan begitu. Antar. Kalo yang gini-gini kan pak Satrio ngga ada masalah ya? Antar perguruan tinggi Indonesia dan di Taiwan. Perguruan tingginya sudah ngga usah, antar perguruan tinggi di Indonesia dan Taiwan. Nah begitu. Kalo yang nirmatif begini kan pak Satrio ngga ada masalah. Oh iya kita sudah ngawasi pak, ini ya paling itu kalo ada masalah apa-apa kan, iya ngga. Ujung-ujungnya kan begitu, sudah ngawasi pak tapi ternyata begini. Ujung-ujungnya kesimpulannya jadi normatif.

**PIMPINAN :**

Pak Irjan cukup? Iya nggak usah diskusikan soal survei itu dengan pak Marianus, dia senang soalnya gitu-gitu. Saya ini masalahnya itu survei yang pak Satrio lakukan bukan lembaga-lembaga lain. Iya makanya, coba atas hapus dulu *draft*nya itu, oke. Maka kesimpulan, *draft* kesimpulan rapat ini mesti kita setuju.

**(RAPAT : SETUJU)**

Pak Abidin terlambat sudah di setuju ini rapat. Tadi mau saya kasih pak Abidin tadi cuma kan sudah ketok dulu. Baik bapak ibu saudara jika tidak ada yang ingin disampaikan saya minta pak Sekjen untuk memberikan kata akhir dalam rapat ini, demikian.

**SEKJEN KEMNAKER RI :**

**Yang terhormat bapak pimpinan.**

**Bapak ketua, bapak dan ibu ketua Komisi IX DPR RI dan bapak ibu Anggota Komisi, Anggota DPR Komisi IX yang kami hormati.**

Kami mengucapkan terima kasih banyak atas terselenggaranya rapat dengar pendapat yang sangat kondusif ini dan kami pihak Kemenaker akan segera menindaklanjuti ada hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan dalam rapat mudah-

mudahan apa yang menjadi saran dan arahan dari bapak dan ibu sekalian anggota DPR yang kami hormati, kami akan segera bisa menindak lanjuti dengan baik. Demikian sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**PIMPINAN :**

Baiklah bapak ibu saudara jika sudah tidak ada yang ingin disampaikan, ijinilah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota untuk menutup rapat ini dengan bacaan Hamdallah.

***Alhamdulillahirabbilalamin.***

**RAPAT SELESAI PUKUL 15.52**